

**ANALISIS PROGRAM DANA DESA TERHADAP  
PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT  
DI KECAMATAN PESISIR TENGAH KABUPATEN PESISIR  
BARAT DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

**Skripsi**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
Dalam Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam

Disusun oleh :

Yusril Mulia  
NPM 1451010271

Jurusan : Ekonomi Syari'ah



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1440 H / 2019 M**

**HALAMAN JUDUL**

**ANALISIS PROGRAM DANA DESA  
TERHADAP PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT  
DI KECAMATAN PESISIR TENGAH KABUPATEN PESISIR BARAT  
DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

**Skripsi**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
Dalam Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1440 H / 2019 M**

## ABSTRAK

Guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa dalam segala aspeknya sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, Undang Undang No. 6 Tahun 2014 memberikan mandat kepada Pemerintah untuk mengalokasikan Dana Desa. Dana desa adalah dana APBN yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Maka rumusan masalah yaitu bagaimana pelaksanaan dan dampak program Dana Desa terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Pesisir Tengah dalam perspektif ekonomi Islam. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui pelaksanaan program dan dampak dana desa terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Pesisir Tengah dalam perspektif ekonomi Islam. Kegunaan penelitian agar dapat dijadikan rujukan dalam pengambilan keputusan yang di ambil dan sebagai pedoman program Dana Desa.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan dengan metode penelitian deskriptif kualitatif, cara yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: observasi, wawancara, serta dokumentasi. Sampel dalam penelitian ini adalah aperatur desa, tokoh masyarakat dan masyarakat di Kecamatan Pesisir Tengah, dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Untuk menganalisa data, penulis melakukan reduksi data, menyajikan data dan menarik kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat kesimpulan Pelaksanaan program dana desa Pekon Way Redak untuk pembangunan yaitu sebesar 81,21% dan pemberdayaan masyarakat sebesar 18,79%, pekon Seray untuk pembangunan yaitu sebesar 78,38% dan pemberdayaan masyarakat sebesar 21,62%, pekon Kampung Jawa untuk pembangunan sebesar 84,05% dan untuk pemberdayaan masyarakat sebesar 15,95%, pekon Rawas untuk pembangunan sebesar 82,84% dan untuk pemberdayaan masyarakat sebesar 17,16%, pekon Sukanegara untuk pembangunan 85,80%, dan untuk pemberdayaan sebesar 14,20%, dan pekon Pahmungan untuk pembangunan sebesar 82,96% dan untuk pemberdayaan masyarakat sebesar 17,04%. Pada tahun 2017 program dana desa telah memberikan dampak kesejahteraan kesehatan pada pekon Way Redak, Rawas, Kampung Jawa, Sukanegara dan Pahmungan, kesejahteraan pendidikan pada pekon Seray, Rawas, Sukanegara dan Pahmungan, kesejahteraan pendapatan pada pekon Way Redak, Seray, Kampung Jawa, Rawas dan Pahmungan, kesejahteraan pengeluaran pada pekon Way Redak, Seray, Kampung Jawa, Rawas, Sukanegara dan Pahmungan, dan kesejahteraan perumahan pada pekon Sukanegara dan Pahmungan. Dampak dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat dalam perspektif ekonomi islam berdasarkan masalahnya masyarakat di Kecamatan Pesisir Tengah dapat memenuhi kebutuhan Dharuriyat dan Hajjiyat dalam penerapannya dana desa telah menerapkan prinsip islam yaitu keadilan, pertanggung jawaban dan takaful.

## **SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : YUSRIL MULIA

NPM : 1451010271

Jurusan : Ekonomi Syari'ah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“ANALISIS PROGRAM DANA DESA TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KECAMATAN PESISIR TENGAH KABUPATEN PESISIR BARAT DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM”** adalah benar benar hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 21 Maret 2019

YUSRIL MULIA  
1451010271





**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

*Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Telp (0721) 703531, 780421 Kode Pos 35131*

**PERSETUJUAN**

**Judul Skripsi**

**:ANALISIS PROGRAM DANA DESA TERHADAP  
PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT  
DI KECAMATAN PESISIR TENGAH DALAM  
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

**Nama Mahasiswa**

**: Yusril Mulia**

**NPM**

**: 1451010271**

**Jurusan**

**: Ekonomi Syari'ah**

**Fakultas**

**: Ekonomi dan Bisnis Islam**

**MENYETUJUI**

**Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqosyah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.**

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**A.Zuliansyah, S.Si., M.M.**

**Ulul Azmi Mustofa, S.E.I., M.S.I.**

**NIP. 198302222009121003**

**NIP.**

**Ketua Jurusan**

**Madnasir, S.E., M.Si.**

**NIP. 197504242002121001**





**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

*Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Telp (0721) 703531, 780421 Kode Pos. 35131*

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul : **ANALISIS PROGRAM DANA DESA TERHADAP  
PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KECAMATAN  
PESISIR TENGAH KABUPATEN PESISIR BARAT DALAM PERSPEKTIF  
EKONOMI ISLAM** disusun oleh **YUSRIL MULIA, NPM 1451010271**, Jurusan  
**EKONOMI SYARI'AH** telah diujikan dalam sidang Munaqosah Fakultas  
**EKONOMI DAN BISNIS ISLAM** pada Hari/Tanggal: Kamis/ 27 Juni 2019

**TIM MUNAQOSYAH**

**Ketua**

: **Madnasir, S.E., M.Si.**

**Sekretaris**

: **Okta Suprianingsih, S.E., M.E.Sy.**

**Penguji I**

: **Fatih Fuadi, S.E.I., M.Si.**

**Penguji II**

: **A. Zuliansyah, S.Si., M.M.**

**Mengetahui**

**Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**



**Muhammad Bahrudin, M.A.**

**NIP. 19580824 198903 1 003**



## MOTTO

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى  
عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

**Artinya :** "dan katakanlah, "bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaan kamu, begitu juga rasul-Nya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan kembali kepada (Allah) yang mengetahui yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan ".<sup>1</sup>



---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al- Jamanatul „Ali Al-Qur“an dan Terjemahannya* (Bandung: Cv Penerbit J-ART, 2004), h. 548.

## PERSEMBAHAN

*Alhamdulillah... Alhamdulillah... Alhamdulillahirobbil"alamin* Sujud syukur kupersembahkan kepada Allah SWT yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang dan Maha Kuasa atas segala sesuatu, pada akhirnya tugas akhir (skripsi) ini dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat beriring salam semoga selalu tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW manusia pembawa risalah. Manusia yang memiliki cinta yang teramat luas kepada umatnya. Saya senantiasa berdoa, semoga Saya bisa bertemu dengannya di telaga Al-Kautsar, amin. Karya sederhana ini Saya persembahkan kepada :

1. Kedua orang tua yang tercinta, bapak Zulfikri dan ibu Marya yang telah memberikan cinta, kasih sayang, pengorbanan, nasehat, semangat, dan do"a yang tiada henti untuk kesuksesan Saya. Mereka yang begitu teristimewa dalam hidup Saya dan kucinta karena Allah.
2. Tak lupa kusampaikan terima kasih atas do"a, canda tawa kakak (Tika Fitri) dan adik-adikku (Rizkon Jaya, Ahmad Yusef Marfikal dan Suci Rahmawati) tersayang. Semoga kita semua bisa membuat kedua orang tua kita selalu bahagia.



## RIWAYAT HIDUP

**Yusril Mulia**, lahir di Dusun Bakti Rahayu Pekon Rawas Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung, pada tanggal 16 Oktober 1994. Anak kedua dari lima bersaudara dari pasangan bapak Zulfikri dan ibu Marya.

1. Dimulai pada tahun 2001 penulis sekolah di SDN 1 Rawas.
2. Tahun 2007 penulis sekolah di SMP Negeri 2 Pesisir Tengah.
3. Tahun 2010 penulis melanjutkan pendidikan di SMAN 1 Pesisir Tengah, selama masa SMA, penulis pernah aktif pecak silat dan PRAMUKA.
4. Tahun 2014 dengan dukungan dari kedua orang tua dan tekad yang kuat dan selalu mengharap ridho Allah SWT, penulis memutuskan untuk melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Syariah dengan penuh harapan dapat bertambahnya ilmu pada diri penulis. Penulis pernah tergabung dalam RISEF. Pada bulan Agustus 2017 penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Bangunan Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan.

## KATA PENGANTAR

Rasa syukur senantiasa kucurahkan kepada Sang Pencipta, Sang Pemilik Cinta, Allah SWT. Jika tanpa kuasa-Nya penulis tidak akan mampu menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW manusia yang mengajarkan kepada umat manusia betapa indahnya iman dan Islam. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.

Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan serta dukungan berbagai pihak. Oleh sebab itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Dr. Moh. Bahrudin, M.A., selaku dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam yang senantiasa mengayomi mahasiswa.
2. Madnasir, S.E., M.Si., selaku ketua prodi ekonomi Islam yang memberikan dukungan kepada penulis.
3. A. Zuliansyah, S.Si., M.M., selaku pembimbing I yang telah tulus dan ikhlas meluangkan waktunya, menuntun dan mengarahkan, membimbing, memberikan begitu banyak inspirasi kepada penulis untuk berkarya sebaik-baiknya, serta pelajaran yang tiada ternilai harganya demi keberhasilan penulis.
4. Ulul Azmi Mustofa, S.E.I., M.S.I., selaku pembimbing II yang telah tulus dan ikhlas meluangkan waktunya, menuntun dan mengarahkan, membimbing,

memberikan begitu banyak inspirasi kepada penulis untuk berkarya sebaik-baiknya, serta pelajaran yang tiada ternilai harganya demi keberhasilan penulis.

5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (khususnya Jurusan Ekonomi Syaria<sup>h</sup>) yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung, jasa kalian akan selalu terpatrit di hati.
6. Aparatur pemerintah dan tokoh masyarakat di Kecamatan Pesisir Tengah yang telah meluangkan waktu dan membantu penulis dalam memperoleh data-data untuk penelitian.
7. Pimpinan dan karyawan perpustakaan Fakultas dan Universitas yang telah memberi informasi, data, referensi, dan lain-lain.
8. Sahabat dan teman yang selalu membantu di dalam penyusunan skripsi dan juga ucapan terimakasih atas perhatiannya selama ini terhadap penulis. Teman-teman Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam jurusan Ekonomi Islam kelas A angkatan 2014 dan semua pihak yang tidak bisa disebutkan Satu persatu.

Semoga Allah SWT senantiasa membalas jasa dan kebaikan pada semua pihak yang telah membantu serta mendo'akan sampai selesainya skripsi ini.

Bandar Lampung, januari 2018

Yusril Mulia  
NPM 1451010271



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xv</b>
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Penegasan Judul .....	1
B. Alasan Memilih Judul .....	2
C. Latar Belakang Masalah.....	4
D. Rumusan Masalah .....	10
E. Tujuan Penelitian.....	10
F. Manfaat Penelitian.....	10
G. Metode penellitian.....	11
H. Penelitian Terdahulu .....	16
I. Kerangka Berfikir.....	20
 <b>BAB II DANA DESA TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT .....</b>	
A. Dana Desa .....	21
1. Pengertian Dana Desa.....	21
2. Dasar Hukum Dana Desa .....	22
3. Tujuan Dana Desa .....	23
4. Penyaluran Dana Desa.....	23
5. Penggunaan Dana Desa .....	25
B. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat.....	29
1. Pengertian Kesejahteraan Masyarakat.....	29
2. Indikator Kesejahteraan Masyarakat .....	31
C. Kesejahteraan Masyarakat Dalam Ekonomi Islam .....	37
 <b>BAB III PROGRAM DANA DESA TERHADAP PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KECAMATAN PESISIR TENGAH .....</b>	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	44
1. Sejarah Kecamatan Pesisir Tengah .....	44
2. Kondisi Geografis Kecamatan Pesisir Tengah .....	45
3. Kondisi Demografis Kecamatan Pesisir Tengah.....	47
B. Kondisi Masyarakat Kecamatan Pesisir Tengah .....	51

1. Tingkat Pendidikan Masyarakat .....	52
2. Tingkat Kesehatan Masyarakat .....	53
3. Tingkat Pendapatan Masyarakat.....	43
4. Tingkat pengeluaran Masyarakat .....	56
5. Tingkat Perumahan .....	58
C. Program Dana Desa Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Pesisir Tengah .....	58
1. Program Dana Desa di Kecamatan Pesisir Tengah .....	58
2. Dampak Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Pesisir Tengah.....	78
<b>BAB IV ANALISIS PROGRAM DANA DESA TERHADAP PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KECAMATAN PESISIR TENGAH .....</b>	<b>83</b>
A. Analisis Program Dana Desa Tahun 2017 Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat.....	83
B. Dampak Program Dana Desa Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat.....	85
C. Analisis Program Dana Desa Tahun 2017 Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam .....	91
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>95</b>
A. Kesimpulan.....	95
B. Saran.....	96
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

1. Tabel 1 Jumlah Dana Desa .....	7
2. Tabel 2 Jumlah Keluarga Prasejahtera .....	8
3. Tabel 3 Jumlah Populasi Penelitian .....	12
4. Tabel 4 Jumlah Sampel Penelitian .....	14
5. Tabel 5 Daftar Luas Kecamatan Peisir Tengah Berdasarkan Pekon .....	46
6. Tabel 6 Jumlah Penduduk Per Pekon .....	47
7. Tabel 7 Jumlah Penduduk Berdasarkan Suku .....	48
8. Tabel 8 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama .....	48
9. Tabel 9 Jumlah Tempat Peibadatan .....	49
10. Tabel 10 Jumlah Sekolah .....	50
11. Tabel 11 Prasarana Kesehatan .....	50
12. Tabel 12 Mata Pencaharian Penduduk .....	51
13. Tabel 13 Tingkat Pendidikan .....	52
14. Tabel 14 Tingkat Kesehatan Masyarakat 2016.....	53
15. Tabel 15 Tingkat Kesehatan Masyarakat 2016.....	53
16. Tabel 16 Tingkat Pendapatan Masyarakat 2016 .....	55
17. Tabel 17 Tingkat pengeluaran Masyarakat 2017 .....	57
18. Tabel 18 Tingkat Perumahan Masyarakat .....	56





## DAFTAR GAMBAR

1. Gambar 1 Struktur Organisasi Kecamatan Pesisir Tengah
2. Gambar 2 Wawancara Masyarakat di Kecamatan Pesisir Tengah
3. Gambar 3 Rabat Beton Bakti Rahayu
4. Gamabar 4 Rabat Beton Pahmungan



## DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran 1 Permintaan Surat Izin Pra Riset
2. Lampiran 2 Permintaan Izin Riset
3. Lampiran 3 Surat Izin Pra Riset dari Kecamatan Pesisir Tengah
4. Lampiran 4 Surat Izin Riset dari Kecamatan Pesisir Tengah
5. Lampiran 5 Lembar Keputusan Dekan
6. Lampiran 6 Daftar Wawancara
7. Lampiran 7 Profil Kecamatan Pesisir Tengah
8. Lampiran 9 Struktur Kecamatan Pesisir Tengah



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran jelas dan memudahkan dalam memahami skripsi ini, maka perlu adanya uraian terhadap arti dari beberapa istilah yang terkait dengan tujuan skripsi ini. Adapun judul skripsi ini **“Analisis Program Dana Desa Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat Dalam Perspektif Ekonomi Islam”** untuk itu perlu di uraikan pengertian istilah-istilah judul sebagai berikut:

#### 1. Analisis

Analisis adalah usaha untuk menggambarkan pola pola secara konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat dipelajari dan diterjemahkan dan memiliki arti.<sup>1</sup>

#### 2. Program

Program adalah seperangkat kegiatan yang akan dilakukan dengan penggunaan sumberdaya yang tersedia dan menghasilkan manfaat.<sup>2</sup>

#### 3. Dana desa

Dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten dan kota

---

<sup>1</sup>Surayin, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Bandung: Yrama Widya, 2001), h.10.

<sup>2</sup>Malayu S.P, Hasibuan, *Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2015), h. 91.



yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat.<sup>3</sup>

#### 4. Kesejahteraan masyarakat

Kesejahteraan Masyarakat adalah salah satu kondisi terpenuhinya kebutuhan sandang dan pangan, biaya pendidikan dan kesehatan yang murah dan berkualitas atau kondisi dimana tercukupinya kebutuhan jasmani dan rohani.<sup>4</sup>

#### 5. Ekonomi islam

Ekonomi islam adalah bidang ilmu ekonomi yang syarat akan prinsip prinsip keislaman yang bersumber dari al-Quran dan As-Sunnah yang menjadi dasar dari pandangan hidup islam, yang memuat akan prinsip keadilan, pertanggung jawaban dan juga takaful (jaminan sosial).<sup>5</sup>

Jadi yang dimaksud dari judul Analisis Program Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Pesisir Tengah Dalam Perspektif Ekonomi Islam adalah menggambarkan pengelolaan Dana Desa terhadap kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat dalam kajian Ilmu Ekonomi Islam.

### **B. Alasan Memilih Judul**

#### 1. Alasan Objektif

Pesisir Barat merupakan kabupaten di Provinsi Lampung yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai kabupaten

---

<sup>3</sup>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa

<sup>4</sup>Rudi Badrudin, *Ekonomi Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: UUPSTIM YKPN, 2012), h.145.

<sup>5</sup> Ruslan Abdul Ghofur Noor, *Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam Dan Format Keadailan Ekonomi di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), h.62-63.

tertinggal di Indonesia. Guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan desa dalam segala aspeknya sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, UU Nmor 6 Tahun 2014 memberikan mandat kepada pemerintah untuk mengalokasikan Dana Desa. Dana Desa tersebut dianggarkan setiap tahun dalam APBN yang diberikan kepada setiap desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa. Kebijakan ini sekaligus mengintegrasikan dan mengoptimalkan seluruh skema pengalokasian dari pemerintah desa kepada desa yang selama ini sudah ada. Tujuan dari dana desa menurut Undang Undang No 6 Tahun 2014 adalah meningkatkan pelayanan publik di desa, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa, serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan. Jumlah dana Dana Desa yang diterima di kecamatan Pesisir Tengah selalu meningkat dari 2015 hingga 2018. Akan tetapi di kecamatan pesisir tengah kabupaten Pesisir barat jumlah angka masyarakat prasejahteranya setiap tahun selalu bertambah pada beberapa Desa diKecamatan Pesisir Tengah. Kecamatan Pesisir tengah pada tahun 2018 di Desa Rawas, Seray, dan Kampung Jawa mengalami penambahan jumlah keluarga prasejahtera dari tahun 2017 hingga 2018.

## 2. Alasan Subjektif

- a. Bahasan di dalam skripsi ini sesuai dengan jurusan yang penulis pelajari di fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, sehingga dapat menambah wawasan bagi penulis maupun pembaca.

- b. Tersedianya referensi yang mendukung sehingga dapat mempermudah penulis dalam menyelesaikan penelitian tersebut.
- c. Sesuai dengan jurusan penulisan dengan meneliti Analisis Program Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat Dalam Perspektif Ekonomi Islam dapat menambah pengetahuan Tentang pembangunan.

### C. Latar Belakang Masalah

Otonomi daerah merupakan kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. Prinsip utama otonomi desa adalah kewenangan membuat keputusan sendiri melalui semangat keswadayaan yang telah lama dimiliki oleh desa, dalam suatu kesatuan wilayah perdesaan. Berdasarkan konteks pembangunan daerah, pemerintah desa merupakan unit terdepan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta menjadi tonggak strategis terhadap keberhasilan program pembangunan dalam memperkuat desa dan lembaga kemasyarakatan.<sup>6</sup>

Sesuai dengan ketentuan MPR RI Nomor XV/MPR/1998 penyelenggara otonomi daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah secara profesional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta pertimbangan keuangan pusat dan daerah.

---

<sup>6</sup>Nurman, *Strategi Pembangunan Daerah*, (Pekanbaru: PT Rajagrafindo Persada, 2013), h. 253-260.

Disamping itu, penyelenggaraan otonomi daerah juga dilaksanakan sebagai prinsip prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.<sup>7</sup>

Dengan diterbitkan Undang Undang No 6 Tahun 2014 tentang desa posisi pemerintahan desa menjadi semakin kuat ini karena pemerintah desa diyakini lebih mampu memprioritas kebutuhan masyarakat dibandingkan pemerintah kabupaten yang secara nyata memiliki ruang kebutuhan permasalahan yang lebih luas dan rumit. Untuk itu pembangunan desa yang dilaksanakan harus sesuai dengan permasalahan yang dihadapi, serta partisipasi masyarakatnya dengan menggunakan sumberdaya yang diperlukan untuk merancang dan membangun perekonomian yang dimiliki, serta memanfaatkan potensi ekonomi yang ada sehingga dapat lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa dalam segala aspeknya sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, Undang Undang No. 6 Tahun 2014 memberikan mandat kepada Pemerintah untuk mengalokasikan Dana Desa. Dana Desa tersebut dianggarkan setiap tahun dalam APBN yang diberikan kepada setiap desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa. Kebijakan ini sekaligus mengintegrasikan dan mengoptimalkan seluruh skema pengalokasian anggaran dari Pemerintahan kepada desa yang selama ini sudah ada.

---

<sup>7</sup>Deddy Supriady Bratakusumah, Dadang Solihin, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001), h.2.



Dana desa adalah dana APBN yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Berdasarkan Undang Undang No. 6 Tahun 2014 tujuan dana desa adalah meningkatkan pelayanan publik di desa, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa, serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan.

Kabupaten Pesisir Barat merupakan daerah agraris yang ditunjukan dengan mata pencaharian pokok penduduknya disektor pertanian, perkebunan dan perikanan. Kabupaten Pesisir Barat merupakan pintu gerbang Provinsi Bengkulu yang dihubungkan dengan Jalan Lintas Barat Sumatra, sehingga dapat dikatakan sebagai Kabupaten yang mempunyai posisi strategis didukung dengan potensi wilayah yang melimpah. Salah satu sektor unggulan di kabupaten pesisir barat adalah sektor pariwisata, sejak kabupaten pesisir barat diresmikan pada tanggal 22 april 2013 pemerintah daerah mulai mengembangkan sektor pariwisata yang membuahkan hasil yang baik. Namun Kabupaten Pesisir Barat merupakan salah satu kabupaten tertinggal di provinsi lampung.

Kecamatan Pesisir Tengah adalah sebuah kecamatan yang juga merupakan pusat pemerintahan (ibu kota) Kabupaten Pesisir Barat. Kecamatan Pesisir Tengah mulai dari tahun 2015 hingga 2017 selalu mengajukan dana desa. Di Kecamatan Pesisir Tengah setiap desa

mendapatkan dana desa yang jumlahnya selalu meningkat dibandingkan dengan kecamatan kecamatan yang lain di Kabupaten Pesisir Barat.

Kecamatan Pesisir Tengah terdiri dari enam desa dan dua kelurahan. Dimana hanya keenam Desa yang mendapatkan Dana Desa, sedangkan kedua kelurahan di kecamatan pesisir tengah tidak mendapatkan Dana desa karena syarat untuk mendapatkan dana desa adalah desa atau setingkat lebih rendah dari kelurahan.

Berikut daftar dan jumlah dana desa yang diterima setiap desa di Kecamatan Pesisir Tengah.

**Tabel 1**  
**Jumlah Dana Desa**

No	Nama Desa	Tahun	
		2016	2017
1	Way Redak	Rp 640.000.000	Rp 686.323.718
2	Seray	Rp 746.934.549	Rp 686.573.950
3	Kampung Jawa	Rp 400.000.000	Rp 798.937.650
4	Rawas	Rp 700.000.000	Rp 729.907.750
5	Sukanegara	Rp 600.000.000	Rp 756.230.500
6	Pahmungan	Rp 600.000.000	Rp 730.114.940
	<b>Jumlah</b>	Rp 3.686.934.549	Rp 4.338.114.508

Sumber: dokumen catatan Kecamatan Pesisir Tengah

Kesejahteraan masyarakat adalah salah satu kondisi terpenuhinya kebutuhan sandang dan pangan, biaya pendidikan dan kesehatan yang murah dan berkualitas, atau kondisi dimana tercukupinya kebutuhan jasmani dan rohani.<sup>8</sup>

Kesejahteraan merupakan tujuan dari ajaran Islam dalam bidang ekonomi. Kesejahteraan merupakan bagian dari *rahmatan lil alamin* yang diajarkan oleh agama islam. Dalam Al Qu'ran. Kesejahteraan akan diberikan

---

<sup>8</sup>Rudi Badrudin, *Ekonomi Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: UUPSTIM YKPN,2012), h.145.

oleh Allah SWT jika manusia melaksanakan apa yang diperintahkan-Nya dan menjauhi apa yang dilarang-Nya.<sup>9</sup>

Sebagaimana firman Allah dalam surah An Nahl ayat 97

مَنْ عَمِلْ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

Artinya “barangsiapa mengerjakan kebaikan, baik laki laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan kami berikan balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan”(Q.s An Nahl :97)

Kesejahteraan merupakan jaminan dari janji Allah SWT yang diberikan kepada laki laki atau perempuan yang beriman kepada-Nya. Allah SWT juga akan membalas berbagai amal perbuatan baik orang orang yang bersabar dengan pahala yang lebih baik dari amalnya., kehidupan yang baik adalah kehidupan yang bahagia, santai, dan puas dengan rezeki yang halal, termasuk didalamnya mencakup seluruh bentuk ketenangan apapun dan bagaimanapun bentuknya.<sup>10</sup>

Berikut daftar desa yang ada di Kecamatan Pesisir Tengah beserta jumlah kepala keluarga dan perbandingan keluarga pra sejahtera dari tahun 2017-2018.

**Tabel 2**  
**Jumlah Keluarga Prasejahtera**

No	Nama Desa	Keluarga Pra Sejahtera	
		2017	2018

<sup>9</sup>Darsyaf I/bnu Syamsudin, Darussalam, *Prototype Begeri yang damai*, (Surabaya: Media press, 1994),h. 66-68. /

<sup>10</sup>Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, *Terjemahan Tafsir Singkat Ibnu Katsir Jilid IV*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1988),h.595.

1	Way Redak	53	53
2	Seray	98	111
3	Kampung jawa	99	100
4	Rawas	102	106
5	Sukanegara	66	61
6	Pahmungan	79	64
	Jumlah	497	495

Sumber: *dokumen catatan Kecamatan Pesisir Tengah*<sup>11</sup>

Berdasarkan tabel diatas menunjukan jumlah keluarga prasejahtera di desa Rawas, Seray, dan Kampung Jawa mengalami peningkatan. Berdasarkan dari fenomena diatas maka penulis mengambil judul **“ANALISIS PROGRAM DANA DESA TERHADAP PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KECAMATAN PESISIR TENGAH KABUPATEN PESISIR BARAT DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM”**.

#### **D. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan Program Dana Desa Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat?
2. Bagaimanakah dampak program Dana Desa Terhadap Peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat?

---

<sup>11</sup> Agus Triyadi, *Profil Kecamatan Pesisir Tengah*, (Pesisir Barat: Kasubag Umum Dan Keuangan, 2017).



3. Bagaimanakah pelaksanaan program Dana Desa terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat dalam Perspektif Ekonomi Islam?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui program Dana Desa terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat
2. Untuk mengetahui dampak program Dana Desa terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat.
3. Untuk menjelaskan program Dana Desa terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat dalam Perspektif Ekonomi Islam.

#### **F. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritik

Secara teoritik penelitian ini bermanfaat sebagai penunjang ilmu pengetahuan di bidang analisis program Dana Desa terhadap kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat dalam Perspektif Ekonomi Islam.

2. Secara empirik

Bagi pemerintah daerah dapat dijadikan rujukan dalam menentukan kebijakan dan mengambil keputusan terkait program Dana Desa.

## **G. Metode Penelitian**

Adapun metode dalam penelitian ini sebagai berikut :

### **1. Jenis penelitian**

Metode penelitian dilihat dari jenisnya, penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*Field Research*). *Field Research* digunakan dengan cara menggali data yang bersumber dari lokasi atau penelitian lapangan. Penelitian ini akan dilaksanakan di Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat.

### **2. Sifat penelitian**

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif. Deskriptif adalah suatu penelitian yang hanya menggambarkan, melukiskan, memaparkan dan melaporkan suatu keadaan objek penelitian.

Dari pengertian diatas peneliti akan menggambarkan, melukiskan, memaparkan dan melaporkan kenyataan kenyataan yang berfokus kepada analisis program Dana Desa terhadap kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat dalam Perspektif Ekonomi Islam.

### **3. Sumber data**

#### **a. Sumber data primer**

Data primer adalah sumber data yang didapatkan secara langsung dalam penelitian yaitu peneliti terjun langsung kelapangan untuk

mendapatkan data secara langsung dari Masyarakat dan Aparatur desa di kecamatan di Pesisir Tengah kabupaten pesisir barat.

b. Data skunder

Data skunder adalah sumber data yang diperoleh dari sumber bacaan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas seperti, Al-Quran, Hadist, Buku-buku, Internet dan sebagainya.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah semua individu untuk semua kenyataan kenyataan yang diperoleh dari sampel yang hendak di generalisasikan.<sup>12</sup> Populasi merupakan keseluruhan objek penelitian. Adapun populasi dari penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 3**  
**Jumlah Populasi Penelitian**

No	Nama Pekon	Aparatur Pekon	Tokoh Masyarakat	Jumlah KK
1	Way Redak	18	13	300
2	Kampung Jawa	19	15	606
3	Rawas	20	10	491
4	Sukanegara	19	10	485
5	Pahmungan	19	13	233
6	Seray	19	13	562
	<b>Jumlah</b>	<b>114</b>	<b>74</b>	<b>2677</b>

Sumber : *Dokumentasi Kecamatan Pesisir Tengah*

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah populasi penelitian ini terdiri dari 2677 Kepala Keluarga.

---

<sup>12</sup>Sugiyono, *Op.Cit.*h. 216.

## b. Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti.<sup>13</sup>

Untuk mewakili populasi yang telah ditetapkan dalam penelitian ini maka diperlukan sampel sebagai cerminan guna menggambarkan keadaan populasi dan agar lebih mudah dalam melaksanakan penelitian, atau bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.<sup>14</sup>

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dengan cara *Sample Nonprobabilitas* yaitu cara pengambilan sampel yang semua objek atau elemen populasinya tidak memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sampel.<sup>15</sup> Cara penentuan sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah *purposivesampling* yaitu penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek sesuai situasi sosial yang diteliti.<sup>16</sup> Di Kecamatan Pesisir Tengah terdapat 6 Pekon yang dijadikan Populasi tapi karena keterbatasan penulis dalam mengelola data, maka penulis tidak menggunakan data secara keseluruhan untuk diolah. Untuk objektifitas data maka penulis menggunakan perwakilan sampel dari setiap pekonnya yaitu aparatur pekon, tokoh masyarakat dan

---

<sup>13</sup>*Ibid* 109

<sup>14</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 116.

<sup>15</sup>M. Iqbal Hasan, *Pokok Pokok Materi Statistik 2*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), h.91.

<sup>16</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 2.



masyarakat yang mewakili. Sampel ini diambil karena perencanaan program dana desa dengan musyawarah aparatur pekon, tokoh masyarakat dan masyarakat yang mewakili dalam musyawarah.

**Tabel 4**  
**Daftar sampel yang digunakan**

No	Nama Pekon	Aparatur Pekon	Tokoh Masyarakat	Jumlah KK
1	Way Redak	2 Orang	2 Orang	5 Orang
2	Kampung Jawa	2 Orang	2 Orang	5 Orang
3	Rawas	2 Orang	2 Orang	5 Orang
4	Sukanegara	2 Orang	2 Orang	5 Orang
5	Pahmungan	2 Orang	2 Orang	5 Orang
6	Seray	2 Orang	2 Orang	5 Orang
	<b>Jumlah</b>	<b>12 Orang</b>	<b>12 orang</b>	<b>30 Orang</b>

Tabel diatas dapat diketahui bahwa sampel yang diambil dalam penelitian ini berjumlah 54 responden.

#### 5. Metode pengumpulan data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode pengumpulan data diantaranya:

##### a. Observasi

Observasi adalah pengamatan secara langsung lapangan untuk melihat menganalisis mengkaji dengan menggunakan panca indra. Penelitian ini menggunakan observasi Non-Partisipai yaitu peneliti tidak terlibat langsung dengan aktivitas orang orang yang sedang diamati.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> *Ibid*, h.146

Metode ini dilakukan penulis untuk mencari data terkait dengan program dana desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan pesisir Tengah.

b. Wawancara

Wawancara adalah usaha mengumpulkan informasi dengan mengajukan sejumlah pertanyaan untuk dijawab secara lisan.<sup>18</sup> Dalam penelitian ini menggunakan wawancara terstruktur yang bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai informasi yang sesuai dengan tujuan penelitian. wawancara penelitian ini akan dilakukan kepada 12 aparatur pekon, 12 tokoh masyarakat dan 30 masyarakat.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, notulen rapat, agenda dan sebagainya yang berkaitan dengan data yang diinginkan.

Metode dokumentasi digunakan untuk mencari data terkait dengan jumlah dana desa dan program dana desa yang dilaksanakan.

6. Analisa data

Analisa data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:<sup>19</sup>

a. Reduksi data

---

<sup>18</sup> Handari Nawawi, *Metodelogi Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1997), h.141

<sup>19</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), h.247-252.

Dalam penelitian ini yang dimaksud reduksi data adalah merangkum, memilih hal hal pokok, memfokuskan pada hal hal penting untuk mengumpulkan data dan memberikan gambaran yang jelas untuk mempermudah pencarian data.

b. Penyajian data

Dalam penelitian ini penyajian data yang dilakukan adalah dengan mendiskripsikan dalam bentuk uraian singkat, bagan, *flowchart*, dan sejenisnya.

c. Kesimpulan

Dalam penelitian ini setelah dilakukan pengumpulan data dan penyajian data, maka langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan untuk mendapatkan temuan baru.

## H. Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari plagiat maka penelitian yang terdahulu yang berkaitan dengan judul penelitian adalah sebagai berikut :

1. Muhammad Eko Atmojo, Helen Dian Fridayanti, Aulia Nur Kasiwi, Mardha Adhi Pratama “Efektivitas Dana Desa Untuk Pengembangan Potensi Ekonomi Berbasis Partisipasi Masyarakat Di Desa Bangunjiwo” dari jurnal tersebut diketahui bahwa penggunaan alokasi dana desa efektif untuk mengembangkan potensi ekonomi, Desa Bangunjiwo menyediakan pelatihan khusus untuk kegiatan masyarakat dalam mendorong tumbuhnya

potensi ekonomi, dan potensi ekonomi utama Desa Bangunjiwo disebut kajigelem.<sup>20</sup>

2. Kristina Korniti Kila “Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Miau Baru Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur” dari jurnal tersebut diketahui secara umum pengelolaan dana desa dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat di Desa Miau Baru tidak berjalan lancar. Seperti proses perencanaan yang tidak melibatkan masyarakat Desa Miau Baru dan tidak melalui musyawarah (Musrenbang-Desa), Pada proses pelaksanaan anggaran atau kegiatan yang tidak terealisasi sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya.<sup>21</sup>
3. Chandra Kusuma Putra, Ratih Nur Pratiwi, Suwondo “Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Studi Pada Desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang” dari jurnal tersebut diketahui sebagian dari dana ADD untuk pemberdayaan masyarakat digunakan untuk biaya oprasional pemerintahan desa dan bpd sehingga penggunaan ADD tidak sesuai dengan peruntukannya. Faktor pendukung dalam pengelolaan ADD adalah partisipasi masyarakat, dan

---

<sup>20</sup>Muhammad Eko Atmojo, Helen Dian Fridayanti, Aulia Nur Kasiwi, Mardha Adhi Pratama “Efektivitas Dana Desa Untuk Pengembangan Potensi Ekonomi Berbasis Partisipasi Masyarakat Di Desa Bangunjiwo” *Jurnal Ilmu Pemerintahan Universitas MuhammadiyahYogyakarta*, Vol.5. No.1 Tahun 2017.

<sup>21</sup>Kristina Korniti Kila “Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Miau Baru Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur” *Jurnal Administrasi Negara* Volume 5. No.1 Tahun 2017 h. 5188-5200.



faktor penghambatnya adalah kualitas sumber daya manusia dan kurangnya pengawasan langsung oleh masyarakat.<sup>22</sup>

4. Intan Mala Sari “Analisis Ekonomi Kebijakan Dana Desa Terhadap Kemiskinan Desa Di Kabupaten Tulungagung” dari jurnal tersebut dapat diketahui bahwa terjadi perbedaan kemiskinan di Kabupaten Tulungagung dari tahun 2015 sampai 2016, dan dana desa dan ADD berpengaruh terhadap kemiskinan desa.<sup>23</sup>
5. Akbar Prabawa “Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Di Desa Lepu Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara” dari jurnal tersebut diketahui bahwa penggunaan dana pembangunan desa dalam peningkatan pembangunan di Desa Loa Lepu Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara sudah terlaksana walaupun masih banyak kekurangan keahlian yang dimiliki oleh para pelaku aparatur Desa Loa Lepu. Akan tetapi tidak semua program pembangunan desa telah dilaksanakan maupun yang belum selesai pengerjaannya merupakan bentuk tujuan dari pemerintah Desa Loa Lepu untuk menuju perubahan kearah lebih baik meskipun hal itu belum berhasil secara optimal.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup>Chandra Kusuma Putra, Ratih Nur Pratiwi, Suwondo “Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Studi Pada Desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang” *Jurnal Administrasi Publik*, Vol, 1, No. 6 hal 1203-1212.

<sup>23</sup>Intan Mala Sari “Analisis Ekonomi Kebijakan Dana Desa Terhadap Kemiskinan Desa Di Kabupaten Tulungagung” *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol. 15, No.01 Juni 2017.

<sup>24</sup>Akbar Prabawa “Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Di Desa Lepu Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara” *Ejournal Ilmu Pemerintahan*, Volume 3, Nomor 1, 2015 :227-238

6. Lina Nasehatun Nafidah, Nur Anisa “Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Kabupaten Jombang” dari jurnal tersebut diketahui bahwa berdasarkan peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2015 tentang pengelolaan keuangan Desa secara garis besar pengelolaan keuangan Desa telah mencapai akuntabilitas. Selain itu masih diperlukannya adanya pendamping desa dari pemerintahan daerah yang intensif dalam membantu desa untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.<sup>25</sup>
7. Feiby Vencentia Rangkumahat, Vicky V. J. Panelewen. Arie D. P. Mirah “Dampak Program Dana Desa Terhadap Peningkatan Pembangunan dan Ekonomi di kecamatan Penelengan Kabupaten Minahasa” dari jurnal tersebut diketahui program dana desa di Kecamatan Pineleng berjalan cukup baik, namun untuk kedepannya diperlukan adanya peningkatan kapasitas dan skil dari aparatur pemerintah desa dalam rangka mendukung pelaksanaan program ini guna meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.<sup>26</sup>

Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah objek penelitian dan subjek penelitian. Objek pada penelitian ini adalah Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat dan subjek penelitian ini adalah program Dana Desa terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

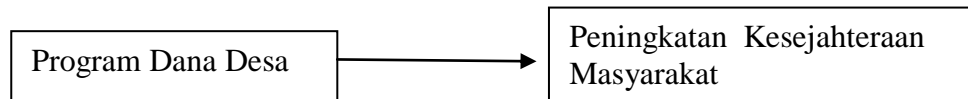
---

<sup>25</sup>Lina Nasehatun Nafidah, Nur Anisa “Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Kabupaten Jombang” *Jurnal Ilmu Akuntansi*, Volume 10 No. 2, Oktober 2017 hal 273-288

<sup>26</sup>Feiby Vencentia Rangkumahat, Vicky V. J. Panelewen. Arie D. P. Mirah “Dampak Program Dana Desa Terhadap Peningkatan Pembangunan dan Ekonomi di kecamatan Penelengan Kabupaten Minahasa” *Agri-Sosio Ekonomi Unsrat, ISSN*, Volume 13 Nomor 2A, Juli 2017 : 335-342

## I. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.



Program Dana yang dibuat oleh pemerintah dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. program Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat sehingga dengan adanya program dana desa tersebut dapat mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat.



## BAB II

### DANA DESA TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

#### A. Dana Desa

##### 1. Pengertian Dana Desa

Guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa dalam segala aspeknya sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, Undang Undang No 6 Tahun 2014 memberikan mandat kepada pemerintah untuk mengalokasikan dana desa. Dana desa tersebut diselenggarakan setiap tahun dalam APBN yang diberikan kepada setiap desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa. Kebijakan ini sekaligus mengintegrasikan dan mengoptimalkan seluruh skema pengalokasian anggaran dari pemerintah kepada desa yang selama ini sudah ada.

Dana desa adalah dana APBN yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Dana desa dianggarkan dalam APBN ditentukan 10% dari dalam dan diluar dana transfer daerah secara bertahap.

Dana desa diperhitungkan berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> Sri Mulyani Indrawati, *Buku Pintar Dana Desa*, (Jakarta: Kementrian Keuangan Republik Indonesia), h.12.

## 2. Dasar Hukum Dana Desa

Adapun landasan hukum dari dana desa yaitu sebagai berikut:<sup>28</sup>

1. Undang Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
2. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN.
3. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN.
4. PM Desa, PDT & Transmigrasi No. 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
5. PM Desa, PDT & Transmigrasi No. 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa.
6. PM Desa, PDT & Transmigrasi No. 3 Tahun 2015 Tentang Pendampingan Desa.
7. PM Desa, PDT & Transmigrasi No. 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Penegelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.
8. PM Desa, PDT & Transmigrasi No. 5 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015

---

<sup>28</sup> A. Saibani, *Tata Kelola Keuangan Desa Dan Pembangunan Desa*, (Bandung: Bee Media Pustaka, 2016), h.9-204.



9. PM Desa, PDT & Transmigrasi No. 6 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 93 / PMK.07 / 2015 tentang tata cara pengalokasian penyaluran, penggunaan, pemantauan dan evaluasi Dana Desa
11. PM Desa, PDT & Transmigrasi No. 21 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016.

### **3. Tujuan dana desa**

Berdasarkan Undang Undang No 6 Tahun 2014 tentang dana desa, tujuan dana desa adalah sebagai berikut:<sup>29</sup>

- a. Meningkatkan pelayanan publik di desa
- b. Mengentaskan kemiskinan
- c. Memajukan perekonomian desa
- d. Mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa
- e. Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan

### **4. Penyaluran dana desa**

Untuk mewujudkan prinsip transparansi dan akuntabilitas serta memastikan capaian penggunaan dana desa, proses penyaluran dana desa mempersyaratkan beberapa kriteria yang harus dipenuhi terlebih dahulu, baik oleh pemerintah desa sebagai pengguna dana desa maupun oleh kabupaten/kota.

---

<sup>29</sup> Sri Mulyani Indrawati, *Buku Pintar Dana Desa*, (Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia), h.13.

Penyaluran dana desa dilakukan secara bertahap dari pemerintah pusat (APBN) ke kabupaten/kota (APBD), dan selanjutnya ke desa (APBdes). Adapun tahap penyaluran dana desa sebagai berikut:<sup>30</sup>

- 1) Tahap I sebesar 60% dari pagu dana desa, paling cepat maret dan paling lambat juli
- 2) Tahap II sebesar 40% dari pagu desa paling cepat agustus dan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah dana desa diterima di APBD kabupaten/kota setiap tahap, dana desa tersebut harus disalurkan ke desa.

Tiap tahap penyaluran dana desa dari APBN ke APBD memiliki persyaratan yang berbeda, berikut persyaratan tahap tahap dana desa:

a. Persyarat penyaluran dana desa tahap I yaitu:

- Perda APBD tahun berkenaan
- Perkada tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa
- Laporan realisasi penyaluran tahap sebelumnya
- Laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan output tahun sebelumnya.

b. Persyarat penyaluran dana desa tahap II yaitu:

- Laporan dana desa tahap I telah disalurkan ke RKD minimal 90%
- Laporan dana desa tahap I telah diserahkan oleh desa rata rata minimal 75%
- Rata rata capaian output minimal 50%

---

<sup>30</sup> *Ibid*, h.38

Tahap tahap penyaluran dana desa dari APBN ke APBD memiliki persyaratan yang berbeda, berikut persyaratan tahap tahap dana desa:

a. Persyarat penyaluran dana desa tahap I yaitu:

- Perdes APB desa
- Laporan realisasi penyerapan dan capaian output dana desa tahap sebelumnya

b. Persyarat penyaluran dana desa tahap II yaitu:

- Laporan penyerapan dana desa
- Tahap 1 rata rata minimal 75% dan rata rata capaian output minimal 50%<sup>31</sup>

## 5. Penggunaan dana desa

Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pembangunan Desa dialokasikan untuk mencapai tujuan pembangunan Desa yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, melalui:<sup>32</sup>

a. Pemenuhan kebutuhan dasar

Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana yang dimaksud pemenuhan kebutuhan dasar meliputi:<sup>33</sup>

- Pengembangan pos kesehatan desa dan polides
- Pengelolaan dan pembinaan posyandu

---

<sup>31</sup> Sri Mulyani Indrawati, *Buku Pintar Dana Desa*, (Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia), h.40.

<sup>32</sup> A. Saibani, *Tata Kelola Keuangan Desa Dan Pembangunan Desa*, (Bandung: Bee Media Pustaka, 2016),h.141.

<sup>33</sup> *Ibid*,h.142.

- Pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini.

b. Pembangunan sarana dan prasarana Desa

Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana yang dimaksud dengan pembangunan sarana dan prasarana untuk mendukung target pembangunan sektor unggulan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dan Rencana Kerja Pemerintahan (RKP) setiap tahunnya, yang diprioritaskan untuk:<sup>34</sup>

- Mendukung kedaulatan pangan
- Mendukung kedaulatan energi
- Mendukung pembangunan kemarintiman dan kelautan
- Mendukung pariwisata dan industri

Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana yang dimaksud pengembangan sarana dan prasarana Desa didasarkan atas kondisi dan potensi Desa, sejalan dengan pencapaian target RPJM Desa dan RKP Desa setiap tahunnya, yang diantaranya dapat meliputi:<sup>35</sup>

- Pembangunan dan pemeliharaan jalan Desa
- Pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani
- Pembangunan dan pemeliharaan embung Desa
- Pembangunan energi baru dan terbarukan
- Pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan
- Pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Desa

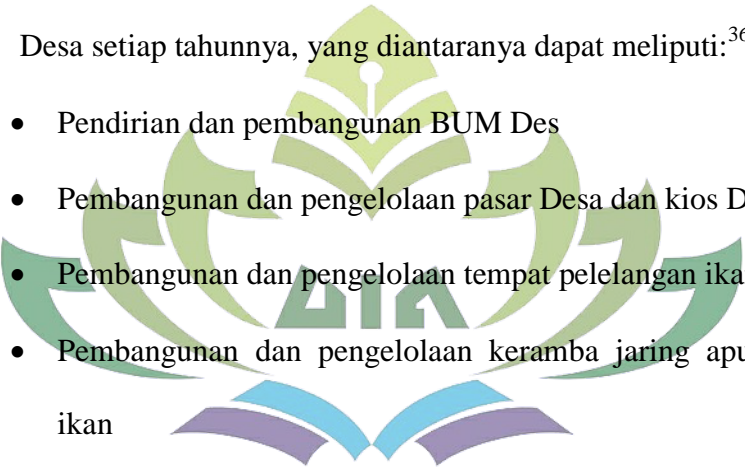
---

<sup>34</sup> *Ibid*,h.142.

<sup>35</sup> A. Saibani, *Tata Kelola Keuangan Desa Dan Pembangunan Desa*, (Bandung: Bee Media Pustaka, 2016),h.142

- Pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier
  - Pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan
  - Pengembangan sarana dan prasarana produksi Desa
- c. Pengembangan potensi ekonomi lokal

Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana yang dimaksud pengembangan potensi ekonomi lokal didasarkan atas kondisi dan potensi Desa, sejalan dengan pencapaian target RPJM Desa dan RKP Desa setiap tahunnya, yang diantaranya dapat meliputi:<sup>36</sup>

- 
- Pendirian dan pembangunan BUM Des
  - Pembangunan dan pengelolaan pasar Desa dan kios Desa
  - Pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik Desa
  - Pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan
  - Pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan Desa
  - Pembuatan pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan
  - Pengembangan benih lokal
  - Pengembangan ternak secara kolektif
  - Pengembangan dan pengelolaan energi mandiri
  - Pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu
  - Pengelolaan padang gembala
  - Pengembangan Desa Wisata

---

<sup>36</sup> A. Saibani, *Tata Kelola Keuangan Desa Dan Pembangunan Desa*, (Bandung: Bee Media Pustaka, 2016), h.143



- Pengembangan teknologi tepat guna pengelolaan hasil pertanian dan perikanan
- d. Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan

Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana yang dimaksud pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan didasarkan atas kondisi dan potensi Desa, sejalan dengan pencapaian target RPJM Desa dan RKP Desa setiap tahunnya, yang diantaranya meliputi:<sup>37</sup>

- Komoditas tambang mineral bukan logam
- Komoditas tambang batuan
- Rumput laut
- Hutan milik Desa
- Pengelolaan sampah

Prinsip penggunaan dana desa yaitu:<sup>38</sup>

a) Keadilan

Mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga desa tanpa membeda-bedakan.

b) Kebutuhan prioritas

Mendahulukan kepentingan desa yang lebih mendesak lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat desa.

<sup>37</sup> *Ibid*, h.143-144

<sup>38</sup> Sri Mulyani Indrawati, *Buku Pintar Dana Desa*, (Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia), h.44.

c) Kewenangan desa

Mengutamakan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa.

d) Partisipatif

Mengutamakan prakarsa dan kreaktifitas masyarakat.

e) Swakelola dan berbasis sumber daya desa

Mengutamakan pelaksanaan secara mandiri dengan pendayagunaan sumber daya alam desa. Mengutamakan tenaga, pikiran dan ketermapilan warga desa dan kearifan lokal.

f) Tipologi desa

Mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan desa.

## **B. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat**

### **1. Definisi Kesejahteraan Masyarakat**

Kesejahteraan masyarakat adalah suatu kondisi yang yang memperlihatkan tentang keadaan kehidupan masyarakat yang dapat dilihat dari standar kehidupan masyarakat.<sup>39</sup>

Sedangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial, yang dimaksud kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial

---

<sup>39</sup> Rudy Badrudin, *Ekonomika Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: UUP STIM YKPN, 2012),h.146.

warga Negara agar hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.<sup>40</sup>

Menurut Send dan Presmann dalam Rudy Badrudin kesejahteraan masyarakat adalah jumlah dari pilihan yang dipunyai masyarakat dan kebebasan untuk memilih diantara pilihan-pilihan tersebut dan akan maksimum apabila masyarakat dapat membaca, makan, memberikan hak suaranya.

Menurut Suryanto dan Susilowati, kesejahteraan masyarakat adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan dasar yang tercermin dari rumah yang layak, tercukupinya kebutuhan sandang dan pangan, biaya pendidikan, dan kesehatan yang murah dan berkualitas atau kondisi dimana setiap individu mampu memaksimalkan utilitasnya dengan tingkat batas tertentu dan kondisi dimana tercukupinya kebutuhan jasmani dan rohani.

Konsep kesejahteraan dapat dibedakan menjadi kesejahteraan individu dan kesejahteraan sosial. Kesejahteraan individu merupakan cara mengaitkan kesejahteraan dengan pilihan individu secara obyektif. Pilihan yang dilakukan individu sebagai uji yang obyektif adalah membandingkan kesejahteraan individu pada situasi yang berbeda. Kesejahteraan sosial merupakan cara mengaitkan kesejahteraan dengan cara menjumlahkan kepuasan seluruh individu dalam masyarakat.<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Pasal 1 ayat (1).

<sup>41</sup> Rudy Bdrudin, *Op-Cit*, h. 145-145

Berdasarkan berbagai teori kesejahteraan menurut para ahli diatas maka yang dimaksud dengan dengan kesejahteraan masyarakat adalah kondisi dimana masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya baik seraca materil maupun nonmateril berupa kebutuhan akan sandang, pangan, dan papan, adanya peningkatan pendapatan serta tersedianya fasilitas penunjang kebutuhan sosial seperti kesehatan, pendidikan dan keagamaan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menjalankan aktifitas sehari-hari.

## **2. Indikator Kesejahteraan Masyarakat**

Kesejahteraan masyarakat dapat diukur dari berbagai indikator, indikator kesejahteraan merupakan suatu ukuran ketercapaian masyarakat dimana masyarakat masyarakat dapat dikatakan sejahtera atau tidak. Berikut beberapa indikator-indikator kesejahteraan masyarakat menurut beberapa organisasi sosial dan beberapa ahli.

Menurut World Bank, tingkat pencapaian pembangunan manusia Dapat diamati melalui dimensi pengurangan kemiskinan (*increase in property*), peningkatan kemampuan baca tulis (*increase in literacy*), penurunan tingkat kematian bayi (*increase il infant mortality*), peningkatan harapan hidup (*life expectancy*), dan penurunan dalam ketimpangan pendapatan (*decrease income inequality*).<sup>42</sup>

Menurut Todaro Stepen C. Smith, kesejahteraan masyarakat menunjukan ukuran hasil pembangunan masyarakat dalam mencapai kehidupan yang lebih baik yang meliputi:

---

<sup>42</sup> *Ibid*, h. 150.

- a. Peningkatan akan kemampuan dan pemerataan distribusi kebutuhan dasar seperti makanan, perumahan, kesehatan, dan perlindungan.
- b. Peningkatan tingkat kehidupan, tingkat pendapatan, tingkat pendidikan yang lebih baik, peningkatan atensi terhadap budaya dan nilai-nilai kemanusiaan.
- c. Memperluas skala ekonomi dan ketersediaan pilihan sosial dari individu dan bangsa.<sup>43</sup>

Menurut Bintarto kesejahteraan dapat diukur dari beberapa aspek kehidupan:<sup>44</sup>

- a. Dengan melihat kualitas hidup dari segi materi, seperti kualitas rumah, bahan pangan, dan sebagainya
- b. Dengan melihat kualitas hidup dari segi fisik, seperti kesehatan tubuh, lingkungan alam, dan sebagainya
- c. Dengan melihat kualitas hidup dari segi mental, seperti fasilitas pendidikan, lingkungan budaya, dan sebagainya
- d. Dengan melihat kualitas hidup dari segi spiritual, seperti moral, etika, keserasian penyesuaian, dan sebagainya.

Dari beberapa definisi indikator kesejahteraan diatas dapat disimpulkan bahwa indikator kesejahteraan meliputi:<sup>45</sup>

---

<sup>43</sup> *Ibid*, h. 153

<sup>44</sup> Devani Ariestha Sari, “Analisis Fktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesejahteraan Masyarakat di Kota Bandar Lampung”, (Skripsi Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung, 2016), h.19-20.

<sup>45</sup> *Ibid*, h. 17-18

a. Pendapatan

Pendapatan merupakan penghasilan yang diperoleh masyarakat yang berasal dari pendapatan kepala rumah tangga maupun pendapatan anggota-anggota rumah tangga. Penghasilan tersebut biasanya dialokasikan untuk konsumsi, kesehatan maupun pendidikan dan kebutuhan lain yang bersifat material. Indikator pendapatan dibedakan menjadi 3 item yaitu:

- 1) Tinggi > Rp. 5.000.000
- 2) Sedang Rp. 1.000.000 – Rp. 5000.000
- 3) Rendah < Rp. 1000.000

b. Konsumsi pengeluaran

Pola konsumsi rumah tangga merupakan salah satu indikator kesejahteraan rumah tangga keluarga. Selama ini berkembang pengertian bahwa besar kecilnya proporsi pengeluaran untuk konsumsi makan terhadap seluruh pengeluaran rumah tangga dapat memberikan gambaran kesejahteraan rumah tangga tersebut. Rumah tangga dengan proporsi pengeluaran yang lebih besar untuk konsumsi makan mengindikasikan rumah tangga yang berpenghasilan rendah. Makin tinggi penghasilan tingkat rumah tangga, makin kecil pengeluaran proporsi pengeluaran untuk makanan terhadap seluruh pengeluaran rumah tangga. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa rumah tangga atau keluarga akan semakin sejahtera bila persentase pengeluaran untuk non makanan kurang <80% dari pendapatan.



c. Pendidikan

Pendidikan merupakan bimbingan atau pertolongan yang diberikan oleh orang dewasa kepada perkembangan anak untuk mencapai kedewasaannya dengan tujuan agar anak cukup melaksanakan tugas hidupnya sendiri tidak dengan bantuan orang lain. Sebagiaian besar masyarakat modern memandang lembaga-lembaga pendidikan sebagai peranan kunci dalam mencapai tujuan sosial pemerintah bersama dengan orang tua telah menyediakan anggaran pendidikan yang di perlukan secara besar-besaran untuk kemajuan sosial dan kemajuan bangsa, untuk mempertahankan nilai-nilai tradisional yang berupa nilai-nilai tradisional yang berupa nilai-nilai luhur yang hasil kewajiban untuk memenuhi hukum-hukum dan norma-norma yang berlaku, jiwa pratistisme dan sebagainya. Menurut menteri pendiidkan kategori pendidikan dalam standar kesejateraan adalah wajib berkisar 9 tahun.

d. Perumahan

Dalam data statistik perumahan dalam konsumsi rumah tangga, berikut konsep dan definisi perumahan menurut Biro Pusat Statistik (BPS) dikatakan perumahan yang dianggap sejahtera adalah tempat berlindung yang mempunyai dinding, lantai, dan atap baik. Bangunan yang dianggap kategori sejahtera adalah luas lantai 10 m dan bagian teluas dari rumah bukan tanah. Status penguasaan tempat milik sendiri.

e. Kesehatan

Kesehatan merupakan keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial ekonomis. Salah satu ukuran yang sering digunakan untuk membandingkan pembangunan sumberdaya manusia antar Negara adalah *Human Development Index* (HDI) atau *Indeks Pembangunan Manusia* (IPM). Index tersebut merupakan indikator komposit yang terdiri dari indikator kesehatan (umur harapan hidup waktu lahir). Pendidikan (angka melek huruf), serta ekonomi (pengeluaran riil perkapita).

Indikator kesehatan yang menjadi indikator kesejahteraan meliputi:

- a) Pangan, dinyatakan dengan kebutuhan gizi minimum yaitu perkiraan kalori dan protein yaitu 2100 kkal hari.
- b) Sandang, dinyatakan indikator pengeluaran rata-rata untuk keperluan pakaian, alas kaki, dan tutup kepala.
- c) Kesehatan, dinyatakan dengan indikator pengeluaran rata-rata untuk menyediakan obat-obatan dirumah, ongkos dokter, perawatan, termasuk obat-obatan.

Tingkat kesejahteraan manusia dapat diukur dengan perhitungan fisik dan non-fisik seperti tingkat konsumsi per-kapita, angka kriminalitas, angkatan kerja, tingkat ekonomi, dan akses di media masa.

Selain itu, kesejahteraan masyarakat juga dapat diukur menggunakan IPM (Indeks Pembangunan Manusia yang terdiri dari tiga

gabungan dimensi yaitu dimensi umur, manusia terdidik dan standar hidup yang layak. Berdasarkan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), kesejahteraan menitik beratkan perhatian terhadap masalah kesehatan lingkungan, tidak rentan terhadap penyakit, mempunyai tempat dan tidak perlu mendapat bantuan sandang dan pangan. Dijelaskan dalam pengelompokan lima jenis keluarga sejahtera menurut Undang-Undang No.10 Tahun 1992 sebagai berikut:<sup>46</sup>

#### 1) Keluarga Pra Sejahtera

Dikatakan keluarga Pra Sejahtera jika keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal, seperti kebutuhan akan pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan dasar bagi anak usia sekolah. Yaitu keluarga yang tidak dapat memenuhi syarat-syarat sebagai keluarga sejahtera I.

#### 2) Keluarga Sejahtera I

Dikatakan keluarga sejahtera I jika keluarga yang baru dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal, tetapi belum dapat memenuhi keseluruhan kebutuhan sosial psikologisnya seperti kebutuhan akan agama/ibadah, kualitas makan, pakaian, papan, penghasilan, pendidikan, kesehatan, dan KB.

#### 3) Keluarga Sejahtera II

---

<sup>46</sup> Levi Martin H, *Analisis Pengembangan Industri Kecil KerajinanmGenteng Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Pengrajin Perspektif Ekonomi Islam*, (Skripsi Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Guna Memperoleh Gelar Sarjana UIN Raden Intan Lampung, 2016), h. 60

Dikatakan keluarga sejahtera II jika keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan dasar dan kebutuhan sosial psikologisnya, akan tetapi belum memenuhi keseluruhan kebutuhan perkembangannya, seperti kebutuhan untuk peningkatan pengetahuan agama, interaksi dengan anggota keluarga dan lingkungannya, serta akses kebutuhan memperoleh informasi.

#### 4) Keluarga Sejahtera III

Dikatakan keluarga sejahtera III jika keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan dasar, kebutuhan sosial dan kebutuhan perkembangannya, namun belum dapat memenuhi kebutuhan aktualisasi diri, seperti sumbangan (kontribusi) secara teratur kepada masyarakat.

#### 5) Keluarga Sejahtera III Plus

Dikatakan keluarga sejahtera III plus jika keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhannya, yaitu kebutuhan dasar, sosial psikologis, pengembangan, serta aktualisasi diri, terutama dalam memberikan sumbangan yang nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat.

### **C. Kesejahteraan Masyarakat dalam Ekonomi Islam**

Al-Qur'an menggunakan beberapa istilah yang berarti kesejahteraan sosial. Di antara istilah-istilah itu yang cangkupan maknanya luas dan mendalam serta menggambarkan konsep kesejahteraan sosial secara

mendasar adalah istilah “*al-falah*” yang menjadi tujuan akhir dalam kehidupan manusia di dunia ini.<sup>47</sup>

Pandangan ekonomi Islam tentang kesejahteraan didasarkan atas keseluruhan ajaran Islam tentang kehidupan ini. Konsep ini sangat berbeda dengan kesejahteraan dalam ekonomi konvensional, sebab ia adalah konsep yang holistik. Secara singkat kesejahteraan yang diinginkan oleh ajaran Islam adalah:

- a. Kesejahteraan holistik dan seimbang, yaitu mencakup dimensi material maupun spiritual serta mencakup individu maupun sosial.
- b. Kesejahteraan di dunia maupun di akhirat, sebab manusia tidak hanya hidup di alam dunia saja tetapi juga di alam akhirat. Jika kondisi ideal ini tidak dapat dicapai maka kesejahteraan di akhirat tentu lebih diutamakan.

Istilah yang sering digunakan untuk menggambarkan keadaan hidup yang sejahtera secara material-spiritual pada kehidupan dunia dan akhirat dalam bingkai ajaran Islam adalah *Fallah*. Dalam pengertian sederhana, *Fallah* adalah kemuliaan dan kemenangan dalam hidup.<sup>48</sup>

Secara kebahasaan *al-falah* berarti keberuntungan, kesuksesan, dan kelestarian dalam kenikmatan dan kebaikan. Sementara itu, ar-Raghib al-Ashfani menjelaskan bahwa perkataan *al-falah* dalam kosa kata Al-Qur'an

---

<sup>47</sup> Aisyah Amini, *Pengaruh Program Corporate Social Responsibility (CSR) Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, (Skripsi Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Guna Memperoleh Gelar Sarjana UIN Raden Intan Lampung, 2018), h. 62

<sup>48</sup> Martini Dwi Pusparini, “Konsep Kesejahteraan Dalam Ekonomi Islam (Perspektif Muqasid As-Syari’ah)”, *Islamic Economics Jurnal* Vol.1 No. 1 : Juni 2015, h. 49.

mengandung dua makna, duniawi dan ukhrawi. Secara harfiah, perkataan *alfalah* berarti mendapatkan atau memperoleh keberuntungan. Al-falah dalam konteks keduniaan ditandai dengan keberhasilan mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia, dan menyenangkan dengan kebersinambungan, berkecukupan, dan bermartabat. Dalam pada itu, al-falah dalam konteks kehidupan akhirat dibangun diatas empat penyangga; (a) kebahagiaan kekal abadi tanpa mengalami kebinasaan, (b) berkecukupan tanpa mengalami kefakiran, (c) kemuliaan tanpa mengalami kehinaan, dan (d) pengetahuan tanpa mengalami kebodohan sehingga bisa dirmuskan tidak ada kehidupan yang sempurna kecuali kehidupan akhirat.<sup>49</sup>

Menurut Imam Al-Ghazali, kesejahteraan dari suatu masyarakat dalam Ekonomi Islam tergantung kepada pencarian dan pemeliharaan lima tujuan dasar:

- a. Agama (*al-dien*) merupakan sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada tuhan yang maha kuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia serta lingkungannya.
- b. hidup atau jiwa (*an-nafsi*) yaitu seluruh kehidupan batin manusia yang terjadi dari perasaan, pikiran, angan-angan dan lain sebagainya.

---

<sup>49</sup> *Ibid*, h. 2.



- c. keluarga atau keturunan (*nasl*) adalah suatu kumpulan manusia yang dihubungkan melalui pertalian darah, perkawinan atau pengambilan anak angkat.
- d. Harta atau kekayaan (*maal*) merupakan segala sesuatu yang dapat dihimpun, disimpan (*dipelihara*), dan dapat dimanfaatkan berdasarkan adat dan kebiasaan.
- e. intelek atau akal (*aql*) yaitu kemampuan daya berfikir, memahami dan menganalisis. Selanjutnya ia menitik beratkan sesuai tuntunan wahyu “kebaikan dunia dan akhirat” merupakan tujuan utamanya.

Imam Al-Ghazali juga mendefinisikan aspek ekonomi dari fungsi kesejahteraan sosialnya dalam kerangka sebuah hirarki utilitas individu dan sosial yang tripartite melalui kebutuhan (*dharuriyat*), kesenangan atau kenyamanan (*haji*) dan kemewahan (*tahsin*). Kunci pemeliharaan dari lima tujuan dasar ini terletak pada penyediaan tingkat pertama, yaitu kebutuhan seperti makanan, pakaian, dan perumahan. Kelompok kedua kebutuhan yang terdiri dari semua kegiatan dan hal-hal yang tidak vital tetapi dibutuhkan untuk menghilangkan kesukaran dalam hidup.<sup>50</sup>

Dalam Islam terdapat masalah yang bertujuan untuk menentukan perbuatan suatu perbuatan. Ada pun beberapa sifat masalah, antara lain:<sup>51</sup>

1. Masalah bersifat subjektif, dalam arti setiap individu menjadi hakim bagi masing-masing dalam menentukan apakah sesuatu perbuatan

---

<sup>50</sup> Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), h.88.

<sup>51</sup> *Ibid*, h.11.

merupakan suatu masalah atau bukan bagi dirinya. Kriteria masalah ini ditetapkan oleh syariah dan sifatnya mengikat bagi semua individu.

2. Masalah orang perorangan akan konsisten dengan masalah orang banyak. Konsep ini sangat berbeda dengan konsep pareto optimum, yaitu keadaan optimal dimana seseorang tidak dapat meningkatkan tingkat kepuasan atau kesejahteraan tanpa menyebabkan penurunan kepuasan atau kesejahteraan orang lain.

Dalam konteks ini, sangat tepat untuk diterapkan bagi pemenuhan kesejahteraan manusia yang mencakup kebutuhan dharuriyat, hajiyat, dan tahsiniyat.<sup>52</sup>

- a. Dharuriyat, adalah penegakan kemaslahatan agama dan dunia. Artinya, ketika dharuriyat itu hilang maka kemaslahatan dunia dan bahkan akhirat juga akan hilang, dan yang akan muncul adalah justru kerusakan dan bahkan musnahnya kehidupan. Dharuriyat menunjukkan kebutuhan dasar ataupun primer yang harus selalu ada dalam kehidupan manusia. Selanjutnya, dharuriyat terbagi menjadi
- b. Hajiyat, adalah hal-hal yang dibutuhkan untuk mewujudkan kemudahan dan menghilangkan kesulitan yang dapat menyebabkan bahaya dan ancaman, yaitu jika sesuatu yang mestinya ada menjadi tidak ada. Hajiyat juga dimaknai dengan keadaan dimana jika suatu kebutuhan dapat terpenuhi maka akan bisa menambah value atau nilai kehidupan manusia.

---

<sup>52</sup> Elzamaulida Merdekawati, *Potensi KontribusiUMKM Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, (Skripsi Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Guna Memperoleh Gelar Sarjana UIN Raden Intan Lampung, 2018), h. 45-46

- c. Tahsiniyat, adalah melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik dan menghindari yang buruk sesuai dengan apa yang telah diketahui oleh akal sehat. Tahsiniyat juga bisa dikenali dengan kebutuhan tersier, atau identik dengan kebutuhan yang bersifat mendekati kemewahan.

Bersumber dari pandangan hidup Islam melahirkan nilai-nilai dasar dalam ekonomi yaitu:<sup>53</sup>

- a. Keadilan, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran, kejujuran, keberanian dan konsistensi pada kebenaran.
- b. Pertanggung jawaban, untuk memakmurkan bumi dan alam semesta sebagai tugas seorang khalifah. Setiap perilaku ekonomi memiliki tanggung jawab untuk berperilaku ekonomi yang sebenarnya, amanah dalam mewujudkan kemaslahatan. Juga memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan secara umum bukan kesejahteraan secara pribadi atau kelompok tertentu saja.
- c. Takaful (jaminan sosial), adanya jaminan sosial dimasyarakat akan mendorong terciptanya hubungan yang baik antar individu dan masyarakat, karena islam tidak hanya mengajarkan hubungan vertikal, namun juga menempatkan hubungan horizontal secara seimbang.

Agar kesejahteraan dapat terwujud, pemerintah ikut berperan dalam mencukupi kebutuhan masyarakat baik kebutuhan primer, sekunder, maupun tersier serta kebutuhan pelengkap lainnya. Pemerintah dilarang

---

<sup>53</sup> Aisyah Amini, *Analisis Pengembangan Industri Kecil KerajinanmGenteng Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Pengrajin Perspektif Ekonomi Islam*, (Skripsi Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Guna Memperoleh Gelar Sarjana UIN Raden Intan Lampung, 2018), h. 46-47

untuk berhenti pada pemenuhan kebutuhan dan pelayanan primer masyarakat saja, namun harus berusaha untuk mencakup seluruh kebutuhan komplementer lainnya. Selain itu, pemerintah juga harus memastikan bahwa upaya yang dilakukannya tidak bertentangan dengan ajaran syariat Islam sehingga kehidupan masyarakat Sejahtera.



### **BAB III**

## **PROGRAM DANA DESA TERHADAP PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KECAMATAN PESISIR TENGAH**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Sejarah Kecamatan Pesisir Tengah**

Kecamatan Pesisir Tengah dengan ibukota kelurahan Pasar Krui resmi menjadi wilayah Kabupaten Pesisir Barat berdasarkan Undang Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung. Kecamatan Pesisir Tengah pada mulanya merupakan wilayah kewedanaan Krui yang dibentuk pada kwartal pertama tahun 1949. Dengan wilayah berasal sebagian dari wilayah Kecamatan Pesisir Utara dan Kecamatan Pesisir Selatan.<sup>54</sup>

Dalam perjalanan kewedanaan Krui yang ketika itu berada dalam pengawasan Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatra Selatan, kemudian terjadi perubahan kembali, hal ini terjadi karena masyarakat kewedanaan Krui memilih bergabung dengan Pemerintah Kabupaten Dati II Lampung Utara. Selanjutnya ketika usulan pembentukan Daerah Tingkat II Lampung Barat mulai dirintis, Kecamatan Pesisir Tengah merupakan salah satu Kecamatan Prioner dari 6 (enam) Kecamatan Induk yang ada saat itu.<sup>55</sup>

Seiring dengan dinamika pemerintahan dan perkembangan kehidupan masyarakat, maka tahun 1990 Kecamatan Pesisir Tengah

---

<sup>54</sup> Agus Triyadi, *Profil Kecamatan Pesisir Tengah*, (Pesisir Barat: Kasubag Umum Dan Keuangan, 2017), h.6.

<sup>55</sup> *Ibid*, h.6

dimekarkan dan melahirkan Kecamatan Perwakilan Karya Penggawa. Berangkat dari kondisi yang ada dengan memperhatikan aspirasi yang berkembang, juga dalam rangka mendekatkan pelayanan masyarakat Kecamatan Pesisir Tengah mengusulkan kepada pemerintah Kabupaten Lampung Barat agar Kecamatan Pesisir Tengah dibentuk kembali dua Kecamatan baru yakni Kecamatan Way Krui dan Kecamatan Krui Selatan.<sup>56</sup>

Dengan segala perjuangan dari masyarakat Kecamatan Pesisir Tengah Khususnya Masyarakat yang berada diwilayah Utara dan Selatan Kecamatan Pesisir Tengah, maka Kecamatan Way Krui dan Krui Selatan secara resmi dibentuk dan terpisah dari Kecamatan Pesisir Tengah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2010 Tanggal 15 April 2010.

## **2. Kondisi Geografis Kecamatan Pesisir Tengah**

Kecamatan Pesisir Tengah resmi menjadi wilayah Kabupaten Pesisir Barat berdasarkan Undang Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang pembentukan Kabupaten Pesisir Barat. Dan dengan dibentuknya Kecamatan Way Krui dan Kecamatan Krui Selatan berdasarkan PERDA Lampung Barat Nomor 02 Tahun 2010, maka wilayah Kecamatan Pesisir Tengah memiliki batas batas sebagai berikut:<sup>57</sup>

Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Way Krui

Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Krui Selatan

---

<sup>56</sup> *Ibid*, h. 7.

<sup>57</sup> *Ibid*, h. 8-9.



Sebelah Barat berbatasan dengan Samudra Hindia

Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Balik Bukit Lampung Barat

Wilayah Kecamatan Pesisir Tengah memiliki luas 120,64 Km<sup>2</sup>.

Berdasarkan letak Geografis Kecamatan Pesisir Tengah terletak pada koordinat 05<sup>0</sup>02'18" Lintang Selatan dan 103<sup>0</sup>56'05" Bujur Timur. Secara Topografi Kecamatan Pesisir Tengah merupakan daerah dataran rendah cenderung berbukit  $\pm$  0-700 M diatas permukaan laut, yang terdiri dari lahan kering, persawahan, pertanian dan perkebunan dengan suhu rata-rata 25-30<sup>0</sup>C.

Peruntukan wilayah Kecamatan Pesisir Tengah sebagian besar adalah digunakan untuk lahan pertanian dan perkebunan dan sisanya terbagi dalam berbagai perntukan seperti pemukiman penduduk, pariwisata, perdagangan, perikanan, peternakan, fasilitas umum dan lain lain. Berikut tabel luas wilayah Kecamatan Pesisir Tengah berdasarkan Pekon:

**Tabel 5**  
**Daftar Luas pekon di Kecamatan Pesisir Tengah**

No	Nama Pekon	Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> )
1	Way Redak	13,30
2	Seray	18,41
3	Kampung Jawa	20,05
4	Rawas	9,49
5	Suka Negara	16,18
6	Pahmungan	17,20
	<b>Jumlah</b>	<b>120,64</b>

Sumber : *Dokumen Kecamatan Pesisir Tengah tahun 2017*

### 3. Kondisi Demografis Kecamatan Pesisir Tengah

#### a. Jumlah penduduk

Berdasarkan data penduduk pekon per bulan April 2017, jumlah penduduk Kecamatan Pesisir Tengah berjumlah 18.673 jiwa yang terdiri dari 8.361 Laki-laki dan 10.312 Perempuan yang tersebar di 6 Pekon dan 2 Kelurahan. Penyebaran penduduk yang tidak merata antara suatu pekon/kelurahan dengan pekon/kelurahan lainnya. Berikut tabel jumlah penduduk berdasarkan pekon:<sup>58</sup>

**Tabel 6**  
**Kepadatan Jumlah Penduduk Per Pekon Kecamatan Pesisir Tengah**

No	Nama Pekon	Luas Wilayah /Km	Jumlah KK	Jumlah Jiwa			Kepadatan Penduduk/Km
				Lk	Pr	Jmlh	
1	Way Redak	13,30	300	500	471	971	73,01
2	Seray	18,41	562	1.117	1.039	2.156	117,11
3	Kampung Jawa	20,05	606	1.164	1.101	2.265	112,97
4	Rawas	9,49	491	919	1.232	2.151	226,66
5	Suka Negara	16,18	233	495	464	959	59,27
6	Pahmungan	17,20	267	582	562	1.144	66,51
7	Kel. Pasar Krui	19,40	1.183	2.122	3.920	6.042	311,44
8	Kel. Pasar Kota Krui	6,61	676	1462	1.523	2.985	451,59
	<b>Jumlah</b>	<b>120,64</b>	<b>4.318</b>	<b>8.361</b>	<b>10.312</b>	<b>18.673</b>	<b>154,78</b>

Sumber: *Dokumen Kecamatan Pesisir Tengah Tahun 2017*

#### b. Sosial budaya

Penduduk Kecamatan Pesisir Tengah sangat majemuk, dengan berbagai suku dan adat istiadat, seperti Suku Lampung, Suku Jawa,

<sup>58</sup> *Ibid*, h.58.

Suku Sunda, Batak, Padang, Betawi yang tersebar di masing masing kelurahan dan pekon. Kehidupan sosial budaya diwilayah ini di dominasi oleh Suku Lampung, Jawa dan Suku Padang dengan kehidupan sosial budaya yang masih kental. Berikut tabel jumlah penduduk Kecamatan Pesisir Tengah berdasarkan suku:<sup>59</sup>

**Tabel 7**  
**Jumlah Penduduk di Kecamatan Pesisir Tengah Berdasarkan Suku**

No	Nama Pekon	Lampung	Padang	Batak	Jawa	Sunda	Lain lain
1	Way Redak	771	2	1	195	2	-
2	Seray	1.950	-	6	100	100	-
3	Kampung Jawa	1.997	30	5	135	95	3
4	Rawas	1.421	50	3	542	105	30
5	Suka Negara	640	5	2	287	10	15
6	Pahmungan	919	-	-	114	93	18
7	Kel. Pasar Krui	3.900	1050	29	815	53	195
8	Kel. Pasar Kota Krui	2.093	280	-	202	140	78
	<b>Jumlah</b>	<b>13.691</b>	<b>1.417</b>	<b>46</b>	<b>2.390</b>	<b>598</b>	<b>339</b>

Sumber: *Dokumentasi Kecamatan Pesisir Tengah Tahun 2017*

c. Jumlah penduduk berdasarkan agama

Penduduk Kecamatan Pesisir Tengah mayoritas memeluk agama Islam yaitu 99,83%, Protestan 0,09%, dan Katolik 0,08%. Berikut tabel jumlah penduduk berdasarkan agama:<sup>60</sup>

**Tabel 8**  
**Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama Kecamatan Pesisir Tengah**

No	Nama Pekon	Islam	Katolik	Protestan	Jumlah
1	Way Redak	971	-	-	971
2	Seray	2.150	6	-	2.156
3	Kampung Jawa	2.265	-	-	2.265
4	Rawas	2.148	3	-	2.151

<sup>59</sup> *Ibid*, h.59.

<sup>60</sup> *Ibid*, h.61.

5	Suka Negara	959	-	-	959
6	Pahmungan	1.144	-	-	1.144
7	Kelurahan Pasar Krui	6.024	2	16	6.042
8	Kelurahan Pasar Kota Krui	2.789	4	-	2.793
	<b>Jumlah</b>	<b>18.450</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>18.481</b>

Sumber: *Dokumen Kecamatan Pesisir Tengah Tahun 2017*

Berdasarkan jumlah penduduk berdasarkan agama, mayoritas penduduk Kecamatan Pesisir Tengah menganut agama Islam. Berikut tabel tempat ibadah berdasarkan agama yang dan keykinan:

**Tabel 9**  
**Jumlah Tepat Peribadatan Agama Per Pekon**

No	Nama Pekon	Masjid	Musholah	Gereja
1	Way Redak	1	-	-
2	Seray	3	1	-
3	Kampung Jawa	2	-	-
4	Rawas	1	3	-
5	Suka Negara	2	3	-
6	Pahmungan	1	-	-
7	Kelurahan Pasar Krui	5	2	-
8	Kelurahan Pasar Kota Krui	3	1	-
	<b>Jumlah</b>	<b>18</b>	<b>10</b>	<b>-</b>

Sumber : *Dokumen Kecamatan Pesisir Tengah Tahun 2017*

d. Lembaga pendidikan

Kecamatan Pesisir tengah memiliki lembaga pendidikan dari tingkat SD, SMP dan SMA. Jumlah lembaga pendidikan di Kecamatan Pesisir Tengah sebanyak 15 Sekolah. Berikut tabel lembaga pendidikan berdasarkan pekon.

**Tabel 10**  
**Jumlah Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan per Pekon**

No	Nama Pekon	SD/MI	SLTP/SM P	SLTA/SM A
1	Way Redak	1	-	-
2	Seray	1	-	-
3	Kampung Jawa	2	-	-
4	Rawas	1	1	1
5	Suka Negara	2	1	-
6	Pahmungan	1	-	-
7	Kelurahan Pasar Krui	1	-	-
8	Kelurahan Pasar Kota Krui	2	1	-
	<b>Jumlah</b>	<b>11</b>	<b>3</b>	<b>1</b>

Sumber : *Dokumen Kecamatan Pesisir Tengah Tahun 2017*

e. Kesehatan

Di Kecamatan Pesisir Tengah sarana kesehatan kurang memadai, terbukti hanya ada 1 puskesmas dan 1 polindes dari 6 pekon untuk pertolongan utama masyarakat. Berikut tabel prasarana kesehatan di Kecamatan Pesisir Tengah:

**Tabel 11**  
**Prasarana Kesehatan di Kecamatan Pesisir Tengah**

No	Jenis Prasarana	Jumlah
1	Puskesmas	1
2	Polindes	1

Sumber : *Dokumen Kecamatan Pesisir Tengah Tahun 2017*

f. Perekonomian

Kondisi perekonomian Kecamatan Pesisir Tengah masih banyak yang harus dikembangkan. Dari jumlah penduduk 6.792 jiwa yang merupakan usia produktif / yang berusia kerja sebagian memiliki pekerjaan sebagai buruh serabutan dan petani. Untuk lebih lengkap berikut tabel mata pencaharian penduduk Kecamatan Pesisir Tengah:

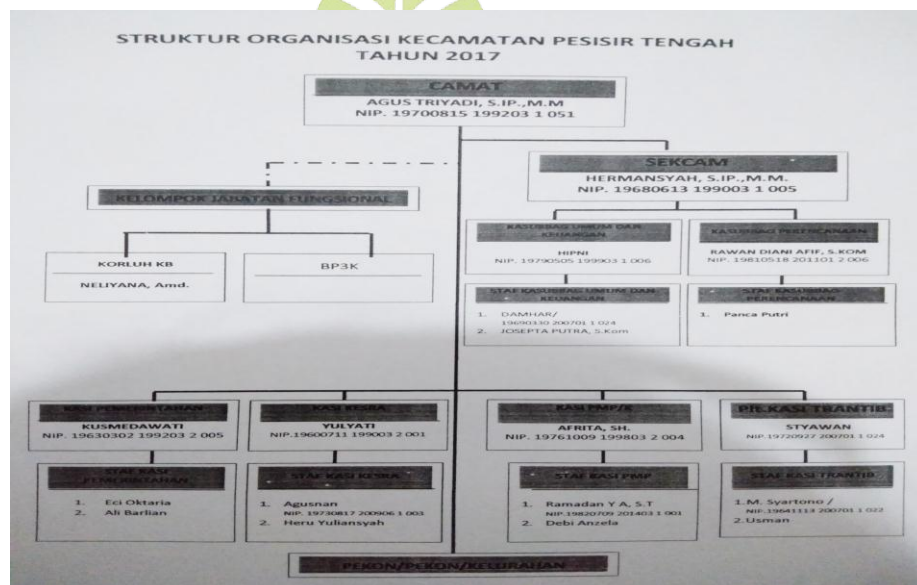
**Tabel 12**  
**Mata Pencaharian Penduduk Kecamatan Pesisir Tengah**

No	Nama Pekon	Petani	Nelayan	Pedagang	PNS	Buruh
1	Way Redak	370	40	35	41	51
2	Seray	570	55	36	48	30
3	Kampung Jawa	51	50	85	195	702
4	Rawas	288	-	49	66	396
5	Suka Negara	85	-	20	20	140
6	Pahmungan	919	-	114	18	93
	<b>Jumlah</b>	<b>2.283</b>	<b>145</b>	<b>339</b>	<b>388</b>	<b>1.412</b>

Sumber : *Dokumen Kecamatan Pesisir Tengah Tahun 2017*

g. Struktur Kecamatan Pesisir Tengah

**Gambar 1**  
**Struktur Organisasi Kecamatan Pesisir Tengah**



**B. Kondisi Masyarakat di Kecamatan Pesisir Tengah.**

Kesejahteraan masyarakat dapat diukur dengan berbagai indikator, indikator kesejahteraan merupakan suatu ukuran tercapainya kesejahteraan masyarakat, dimana masyarakat dapat dikatakan sejahtera atau tidak. Berikut beberapa indikator kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Pesisir Tengah:

**1. Tingkat pendidikan Masyarakat**



Pendidikan adalah suatu bimbingan untuk menegembangkan potensi anak untuk mencapai kedewasaan dengan tujuan agar anak tersebut cukup cakap dalam melaksanakan tugas hidupnya dan tidak tergantung kepada orang lain. Pendidikan dapat diperoleh di lembaga – lembaga formal ataupun non formal.

Tingkat pendidikan penduduk Kecamatan Pesisir Tengah bervariasi, sebagian besar penduduk tamatan Sekolah Dasar (SD) yakni 21,43%, tamatan Sekolah Menengah Pertama (SMP) sederajat 25,68%, tamatan Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat 40,41%, tamatan S1/S2 sederajat 9,72% dan masih ada yang tidak lulus SD yakni 3,13%.<sup>61</sup> Masih tingginya penduduk yang tidak lulus SD dipengaruhi beberapa faktor antara lain rendahnya perekonomian dan pengetahuan masyarakat, kurang perdulinya masyarakat akan pentingnya pendidikan serta faktor usia yang membuat malu untuk mengikuti pendidikan paket A, B dan C. Berikut tabel tingkat pendidikan Kepala Keluarga berdasarkan Pekon:

**Tabel 13**  
**Tingkat Pendidikan Kepala Keluarga Kecamatan Pesisir Tengah**

No	Nama Pekon	TTSD	SD	SMP	SMA	S1/S2	Jumlah KK
1	Way Redak	30	70	35	150	15	300
2	Seray	1	75	200	234	52	562
3	Kampung Jawa	-	54	205	265	82	606
4	Rawas	21	215	107	99	49	491
5	Suka Negara	-	13	59	113	48	233
6	Pahmungan	35	15	55	355	25	485
	<b>Jumlah</b>	<b>2.677</b>					

Sumber : *Dikumen Kecamatan Pesisir Tengah Tahun 2017*

<sup>61</sup> Hipni, Kasubag Umum dan Keuangan, Dokumen Profil Kecamatan Pesisir Tengah 2017.h.60.

Dari tabel diatas disimpulkan bahwa pendidikan di kecamatan pesisir tengah masih rendah dimana masih banyak masyarakat yang hanya sekolah sampai SMA sederajat, SMP, dan tidak tamat SD.

## 2. Tingkat Kesehatan masyarakat

Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Salah satu ukuran yang biasa dipergunakan untuk membandingkan keberhasilan pembangunan sumberdaya manusia antara negara dalam *human development index* (HDI) atau indeks pembangunan manusia atau (IPM).

Untuk indikator kesehatan, indikator yang mewakili (IPM) umur harapan hidup waktu lahir. Namun bila ditanya lebih lanjut cara untuk meningkatkan umur harapan hidup, tidak bisa dijawab dengan pasti. Oleh karna itu diperlukan indikator kesehatan lain yang diperkirakan berdampak pada kesehatan yang tujuannya untuk meningkatkan umur harapan hidup waktu lahir.

**Tabel 14**  
**Tingkat Kesehatan Masyarakat**

No	Indikator	Tahun 2017
1	Angka kematian bayi	1%
2	Angka kematian ibu	0 %
3	Angka harapan hidup	2 %
4	Presentase persalinan oleh tangan medis	90 %

Sumber : Hasil Wawancara di Kecamatan Pesisir Tengah Tahun 2017

Tabel diatas menunjukkan bahwa tingkat kesehatan meningkat salah seorang tokoh masyarakat berkata bahwa tidak ada masyarakat yang kekurangan gizi, atau adanya kematian bayi dan ibu hamil, karna hampir

seluruh masyarakat kecamatan pesisir tengah tidak kekurangan gizi. Minimnya sarana kesehatan seperti puskesmas dan Polindes, dan kecamatan pesisir tengah tidak memiliki puskesmas. Masyarakat lebih memilih untuk pergi ke bidan yang ada di desa untuk berobat.

### **3. Tingkat Pendapatan Masyarakat**

Pendapatan merupakan penghasilan yang diperoleh masyarakat dari penghasilan kepala rumah tangga ataupun pendapatan anggota rumah tangga. Penghasilan tersebut biasanya di alokasikan untuk konsumsi dan kebutuhan lainnya seperti : pangan, kebutuhan jasmani, kesehatan, maupun pendidikan serta kebutuhan lainnya yang bersifat material.

Di kecamatan pesisir tengah mayoritas pekerjaannya adalah petani sebagian besar didominasi oleh petani, buruh, pedagang dan nelayan. masyarakat yang pekerjaannya petani ada yang memiliki lahan sendiri dan ada juga sebagai pekerja lahan perkebunan persawahan, ada juga masyarakat yang berprofesi sebagai buruh yaitu buruh pekerja tani dan buruh pekerja bangunan. tentunya buruh pekerja tani dan buruh pekerja bangunan dan nelayan ini masih harus diperhatikan karena minimnya pendapatan rumah tangga.<sup>62</sup> Program dana desa di bidang pembangunan sedikitnya sudah menunjukkan adanya manfaat dalam menambah pendapatan masyarakat. karena adanya pembangunan jalan di setiap desa sehingga mempermudah mobilitas masyarakat dan menghemat biaya antar barang tani, serta mempermudah akses masyarakat pedagang. Namun

---

<sup>62</sup> Hipni, Kasubag Umum dan Keuangan, Wawancara di Kecamatan Pesisir Tengah Tanggal 10 September 2018.

pembangunan yang dilakukan masih belum merata dan masih banyak yang perlu dibenahi seperti jalan pemukiman pinggiran desa yang banyak dihuni masyarakat namun masih jalan tanah merah yang tentunya jalan tersebut akan berguna bagi masyarakat dan juga mempercepat mobilitas pengiriman barang hasil tani.

**Tabel 15**  
**Pendapatan Rata- rata penduduk tahun 2016**

N0	Jenis profesi	Pendapatan perbulan (Rp)
1	Petani	1.000.000-1.600.000
2	Buruh	800.000-1.400000
3	Pedagang	800.000-1.800.000
4	Nelayan	800000-1.400000

Sumber : *Hasil Wawancara di Kecamatan Pesisir Tengah Tahun 2017*

Berdasarkan tabel menunjukkan adanya peningkatan pendapatan karena, adanya penambahan dana desa setiap tahunnya dari tahun 2016 – 2017 berhasil meningkatkan pendapatan masyarakat.

**Tabel 16**  
**Pendapatan Rata- rata penduduk tahun 2017**

N0	Jenis profesi	Pendapatan perbulan (Rp)
1	Petani	1.000.000-2000.000
2	Buruh	1000.000-2000.000
3	Pedagang	1000.000-2000.000
4	Nelayan	800.000-1.400.000

Sumber : *Hasil Wawancara di Kecamatan Pesisir Tengah Tahun 2017*

Dari tabel diatas menunjukkan adanya peningkatan pendapatan yang dialami profesi buruh, tani dan pedagang. Peningkatan pendapatan pada buruh khususnya buruh bangunan dikarenakan setiap program pembangunan yang diadakan selalu melibatkan masyarakat desa terutama yang memang ahli dibidang bangunan, meningkatnya pendapatan petani sebab akses jalan untuk mengeluarkan barang hasil tani lebih irit dan lebih cepat, meningkatnya pendapatan pedagang dikarenakan terbukanya akses

jalan yang bagus akan menambah minat pengunjung untuk berwisata dan berbelanja.

Meskipun pendapatan sudah meningkat di profesi buruh, tani dan pedagang tentunya masih sangat butuh program pemberdayaan masyarakat khususnya pada ekonomi masyarakat agar pendapatan bisa lebih merata lagi di profesi buruh pekerja tani, tani dan pedagang agar lebih merata.

#### **4. Tingkat pengeluaran masyarakat**

Tingkat pengeluaran masyarakat di dasarkan pada pendapatan masyarakat itu sendiri, pendapatan masyarakat yang rendah berpengaruh pada pola konsumsi rumah tangga biasanya jika pendapatan rendah konsumsi akan diutamakan untuk kebutuhan belanja makanan karna makanan adalah kebutuhan pokok untuk memenuhi kebutuhan jasmani, belanja konsumsi terdiri dari belanja sandang, pangan, papan dan lain - lain.

Hasil kesimpulan wawancara di kecamatan pesisir tengah dengan kepala Pekon yang berada di kecamatan pesisir tengah mereka menuturkan pengeluaran masyarakat tidak selalu sama. Pendapatan yang berbeda - beda menyebabkan perbedaan taraf konsumsi masyarakat, jika pendapatan tinggi maka kebutuhan masyarakat akan terpenuhi, akan tetapi jika pendapatan masyarakat rendah maka konsumsi akan diutamakan untuk kebutuhan pangan. Di kecamatan pesisir tengah pada umumnya pengeluaran untuk konsumsi berkisar sebesar Rp.30.000 ( tiga puluh ribu

rupiah ) perhari, dan itu belum termasuk belanja lainnya seperti kesehatan, pendidikan, bahan bakar kendaraan, pajak dan lain - lain.<sup>63</sup>

Menurut BKKBN Makin tinggi tingkat penghasilan rumah tangga, makin kecil proporsi pengeluaran untuk makanan terhadap seluruh pengeluaran rumah tangga. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa rumah tangga/keluarga akan semakin sejahtera, bila presentase pengeluaran untuk makanan akan jauh lebih kecil dibandingkan presentase pengeluaran untuk non makanan <80% dari pendapatan.

**Tabel 17**  
**Pola Konsumsi Tahun 2017**

No	Pola konsumsi	Pengeluaran perbulan (Rp)
1	Pengeluaran makanan	900.000
2	Pengeluaran pendidikan	500.000
3	Pengeluaran lain-lain	200.000
	Total pengeluaran	1.600.000

Sumber : Hasil Wawancara di Kecamatan Pesisir Tengah Tahun 2017

Dari Tabel diatas dapat diketahui bahwa pengeluaran konsumsi makanan masih lebih besar dari pada konsumsi pendidikan dan kesehatan, sehingga dapat dikatakan bahwa masyarakat masih lebih banyak mencari kebutuhan makanan. Sehingga masyarakat kecamatan pesisir tengah masih harus mencari penghasilan tambahan untuk menambah pendapatan.

## 5. Perumahan

Menurut WHO rumah atau struktur fisik bangunan untuk tempat berlindung, dimana lingkungan berguna untuk kesehatan jasmani dan

<sup>63</sup> Hipni, Kasubag Umum dan Keuangan, Wawancara Tanggal 10 September 2018.

rohani serta keadaan sosialnya baik untuk kesehatan keluarga dan individu. Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau hunian yang dilengkapi dengan prasarana lingkungan yaitu kelengkapan dasar fisik, misalnya penyediaan air minum, pembuangan sampah, tersedianya listrik, telepon, jalan yang memungkinkan lingkungan pemukiman berfungsi sebagaimana mestinya.

Berdasarkan wawancara bapak Hipni tingkat perumahan masyarakat di Kecamatan Pesisir Tengah dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 18  
Tingkat perumahan masyarakat pada tahun 2017

No	Indikator	Keterangan
1	Kepemilikan rumah	Hak milik sendiri
2	Rumah berkualitas baik	80%
3	Rumah tangga mempunyai penerangan listrik	90%
4	Rumah tangga mempunyai mck yang baik	70%

*sumber : dinas perumahan kab pesisir barat*

### **C. Program Dana Desa terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Pesisir Tengah**

#### **1. Program dana desa di Kecamatan Pesisir Tengah**

Program dan pengelolaan Dana Desa di kecamatan Pesisir tengah di kelola langsung oleh kepala desa dan dibantu oleh PTPKD yang terdiri dari sekretaris, kepala seksi dan bendahara, yang bertanggung jawab atas program dana desa ini adalah kepala desa terhadap kabupaten yang akan dipantau oleh Bupati dengan memerintahkan aparaturnya pengawas fungsional daerah untuk melakukan pemeriksaan untuk lebih jelasnya



penulis akan memaparkan program pengelolaan Dana Desa di masing-masing desa :

a. Pekon way redak

Luas wilayah pekon way redak 13.30 Km<sup>2</sup>, dengan Kepala Pekon Bapak Ridwan yang terdiri dari 6 dusun, jumlah penduduk 971 (sembilan ratus tujuh puluh satu) jiwa, dan dipekon ini terdapat 300 (tiga ratus ) KK. Desa ini tahun 2017 mendapat dana desa sebesar Rp 686.323.718,- (Enam ratus delapan puluh enam juta tiga ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus delapan belas rupiah).<sup>64</sup>

Proses penyaluran dana desa dari pemerintah pusat (APBN) ke kabupaten/ kota (APBD), dan selanjutnya ke desa (APBdes). Tahap penyaluran 60% bulan Maret dan 40 % bulan agustus.

Proses penentuan program Dana Desa di Pekon Way Redak melalui proses musyawarah dengan tokoh-tokoh masyarakat untuk menentukan pembangunan dan pengembangan pemberdayaan masyarakat jika program sudah ditentukan dan dana sudah ditranfer ke rekening maka perangkat pekon mempunyai tim pelaksana kegiatan (TPK) untuk membuat surat perintah pembayaran (SPT).

**Tabel 19**  
**Program Dana Desa Pekon Way Redak**

---

<sup>64</sup> Fauzan Helmi, Sekretaris Desa, Wawancara Di Balai Pekon Way Redak, Tanggal 18 Februari 2019.

No	Program	Keterangan	Jumlah Dana
1	Pembangunan	Pembukaan badan jalan puyang ramli	Rp.341.764.800
		Pembangunan gorong-gorong flat	Rp 101.951.450
		pembangunan badan jalan H. Arifin	Rp 110.531.400
		pembangunan anak tangga ke pantai	Rp 3.123.900
2	Pemberdayaan Masyarakat	peningkatan kapasitas masyarakat	Rp 97.759.721
		peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan sosial dasar	Rp 12.142.447
		pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat	Rp 11.050.000
		pemberdayaan masyarakat desa dengan memperkuat tata kelola desa yang demokratis	Rp 6.000.000
		pengelolaan sarana dan prasarana lingkungan berdasarkan kemampuan teknik dan sumberdaya lokal yang tersedia	Rp 2.000.000
Jumlah			Rp 686.323.718

Pada tahun 2017 pekon Way Redak melaksanakan pembangunan jalan untuk mendukung mobilitas masyarakat menggunakan dana desa. Jumlah dana desa yang digunakan untuk pembangunan yaitu 81,21%. Untuk meningkatkan kualitas masyarakat maka diperlukan pemberdayaan masyarakat. Dana desa yang digunakan untuk pengelolaan pemberdayaan yaitu 18,79%.

Berdasarkan wawancara terhadap bapak Fauzan selaku sekretaris pekon, beliau mengungkapkan bahwasanya pada tahun 2017

penggunaan dana desa lebih diprioritaskan untuk meningkatkan pembangunan. Pada tahun 2017 sebagai upaya peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat pekon Way Redak menyelenggarakan program posyandu dan posbindu yang diadakan di balai pekon, pengadaan ranjang tidur posyandu, meteran pengukur tinggi badan, alat tensi darah, stetoscope dan dotpler. Dibidang pemberdayaan masyarakat pekon way redak mengadakan program peningkatan kapasitas masyarakat yaitu pelatihan keterampilan aparatur pekon, pelatihan produk hukum, pelatihan magang aparatur pekon, Peningkatan kapasitas aparatur pekon, peningkatan kapasitas lembaga dan papan informasi pekon Selain itu, untuk meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat pekon way redak memiliki program pelatihan untuk aparatur pekon dan kader masyarakat. Pekon Way Redak juga menyelenggarakan pengadaan dan pembuatan tong sampah untuk menjaga lingkungan bersih.<sup>65</sup>

Dalam pengelolaan dana desa di pekon Way Redak dilakukan secara transparan. Seperti yang dikemukakan oleh bapak Bambang selaku tokoh masyarakat, menurut beliau program dana desa yang meliputi pembangunan dapat dilihat bentuk fisiknya dan sudah dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Adanya pembangunan yang dilakukan

---

<sup>65</sup> Fauzan, *Sekretaris Pekon Way Redak*, Wawancara Tanggal 18 Februari 2019

oleh pekon Way Redak dapat meningkatkan mobilitas masyarakat sehingga dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.<sup>66</sup>

Hal senada juga diungkapkan oleh ibu wati beliau mengemukakan bahwasanya dalam pelaksanaan program dana desa dapat membantu dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adanya pembangunan yang dilakukan dapat mempermudah mobilitas masyarakat dan dengan dilakukan pemberdayaan masyarakat berupa program posyandu dan posbindu, pelatihan aparatur pekon, peningkatan kapasitas lembaga dan papan informasi pekon serta pembuatan tong sampah untuk menjaga lingkungan tetap bersih dapat meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat.<sup>67</sup>

Yang bertanggung jawab atas program dana desa ini adalah Kepala Pekon Way Redak dalam bentuk pertanggung jawaban laporan keuangan terhadap bupati Kabupaten Pesisir Barat.

b. Pekon Seray

Luas wilayah pekon serai ini 18,41 Km<sup>2</sup>, dengan Kepala Pekon bapak Ahmad Sumardi SH, jumlah penduduk 2156 (dua ribu seratus lima puluh enam) jiwa, di pekon ini terdapat 562 (lima ratus enam puluh dua) KK, pada tahun 2017 pekon Serai mendapatkan dana desa Rp 686.573.950 ( enam ratus delapan puluh enam juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).<sup>68</sup>

---

<sup>66</sup> Bambang, *Toko Masyarakat Pekon Way Redak*, Wawancara Tanggal 18 Februari 2019

<sup>67</sup> Wati, *Masyarakat Pekon Way Redak*, Wawancara Tanggal 18 Februari 2019

<sup>68</sup> Wahyudi, Kaur Keuangan, Wawancara Di Balai Pekon Seray, Tanggal 19 Februari 2019.

Proses penyaluran dana desa dari pemerintah pusat (APBN) ke kabupaten/ kota (APBD), dan selanjutnya ke desa (APBdes). Tahap penyaluran 60% bulan Maret dan 40 % bulan agustus.

Proses penentuan program dana desa di Pekon Serai melalui proses musyawarah antara aparatur pekon dan tokoh masyarakat dalam menyampaikan aspirasi masyarakat di pekon tersebut, jika program telah di musyawarahkan serta disusun dan dana sudah masuk ke rekening pekon maka perangkat pekon mempunyai tim pelaksana kegiatan (TPK) untuk membuat surat perintah pembayaran (SPT).

**Tabel 20**  
**Program Dana Desa Pekon Serai**

No	Program	Keterangan	Jumlah Dana
1	Pembangunan	TPT + timbunan sukarama 1 dan 2 serta gang Dakwah	Rp 104.602.415
		pembangunan rabat beton ( gang Dakwah, Gang Bah Tuba dan gan Duku)	Rp 167.989.100
		telford sukarama	Rp 92.294.386
		penerangan jalan umum 9 unit	Rp 145.781.050
		gorong gorong flat beton	Rp 27.443.026
2	Pemberdayaan Masyarakat	Peningkatan kapasitas kader posyandu	Rp 6.574.973
		Peningkatan kapasitas TP-PKK	Rp 6.218.000
		Kegiatan peningkatan mutu PAUD	Rp 9.804.000
		Peningkatan kapasitas aparatur pekon, lembaga dan papan informasi pekon	Rp 22.800.000

	Pelatihan kader pemberdayaan masyarakat desa	Rp 21.126.000
	Pelatihan tim pemelihara kegiatan	Rp 12.244.000
	pelatihan produk hukum pekon	Rp 14.604.000
	Pelatihan ekonomi pekon	Rp 12.994.000
	Pelatihan teknologi tepat guna	Rp 12.994.000
	Pelatihan tim pelaksana kegiatan	Rp 12.284.000
	Pelatihan perencanaan pembangunan pekon	Rp 16.821.000
Jumlah		Rp 686.573.950

Program dana desa tahun 2017 yang dilaksanakan di pekon Seray dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yaitu pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Presentase dana desa yang digunakan dalam pembangunan sebesar 78,38% dan pemberdayaan masyarakat sebesar 21,62%. Pembangunan yang dilakukan di tahun 2017 dilaksanakan untuk meningkatkan mobilitas masyarakat. Pada tahun 2017 pekon Seray melaksanakan program untuk meningkatkan pendidikan yaitu dengan meningkatkan mutu PAUD. Untuk meningkatkan kesehatan masyarakat pekon seray telah melaksanakan program posyandu.

Berdasarkan wawancara kepada Bapak Wahyudi selaku kaur keuangan pekon seray, beliau mengemukakan bahwa program dana

desa di pekon seray dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program yang belum tercapai di tahun sebelumnya, akan ditindak lanjuti pada program dan desa ditahun berikutnya. Pada tahun 2017 dalam upaya meningkatkan pendidikan masyarakat pekon seray membuat program peningkatan mutu PAUD. Secara ekonomi pekon seray di tahun 2017 melaksanakan program pelatihan ekonomi pekon. Program pemberdayaan ekonomi telah dilaksanakan oleh pekon seray meskipun belum tersentuh secara menyeluruh.<sup>69</sup>

Berdasarkan wawancara terhadap masyarakat pekon seray yaitu Tika, Kartini dan Septiawan, mereka mengemukakan bahwa program dana desa yang dilaksanakan dilakukan secara transparan dan terwujud dalam bentuk fisik. Peningkatan mutu Paud yang dilaksanakan di pekon Seray merupakan wujud dari peningkatan kualitas pendidikan. Pada tahun 2017 telah melaksanakan program dalam peningkatan kesehatan masyarakat yaitu pelaksanaan posyandu.<sup>70</sup>

Hal senada juga diungkapkan oleh tokoh masyarakat yaitu bapak Ridwan dan bapak Rahmadi, pekon Seray bahwa dalam perencanaan program dan desa dilakukan dengan musyawarah antara aparatur pekon, tokoh masyarakat dan masyarakat pekon. Pada tahun 2017 telah dilaksanakan program untuk meningkatkan pendidikan yaitu

---

<sup>69</sup> Wahyudi, Kaur Keuangan, Wawancara Di Balai Pekon Seray, Tanggal 19 Februari 2019.

<sup>70</sup> Tika, Kartini dan Septiawan, *Masyarakat Pekon Seray*, Wawancara Tanggal 19 Februari 2019



peningkatan mutu PAUD, peningkatan kesehatan dengan pengadaan posyandu dan secara ekonomi dilakukan pemberdayaan ekonomi.<sup>71</sup>

Yang bertanggung jawab atas pengelolaan dana desa tersebut adalah Kepala Pekon Serai dalam bentuk pertanggung jawaban laporan keuangan dana desa kepada Bupati kabupaten Pesisir barat.

c. Kampung Jawa

Luas wilayah kampung jawa 20,05 Km<sup>2</sup>, dengan Kepala Pekon bapak Arief Mufti dengan jumlah penduduk 2265 (dua ribu duaratus enampuluh lima) jiwa, di pekan ini terdapat 606 (Enam Ratus enam) KK, pada tahun 2017 pekan Kampung Jawa mendapatkan Dana Desa sejumlah Rp 748.937.650 (tujuh ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh rupiah).<sup>72</sup>

Proses penyaluran dana desa dari pemerintah pusat (APBN) ke kabupaten/ kota (APBD), dan selanjutnya ke desa (APBdes). Tahap penyaluran 60% bulan Maret dan 40 % bulan agustus.

Proses penentuan program dana desa di Pekon Kampung Jawa melalui proses musyawarah antara aparatur pekan dan tokoh masyarakat dalam menyampaikan aspirasi masyarakat di pekan tersebut, jika program telah di musyawarahkan serta disusun dan dana sudah masuk ke rekening pekan maka perangkat pekan mempunyai tim pelaksana kegiatan (TPK) untuk membuat surat perintah pembayaran (SPT).

---

<sup>71</sup> Ridwan Rahmadi, *Toko Masyarakat Pekon Seray*, Wawancara Tanggal 19 Februari 2019

<sup>72</sup> Edi Suwiryo, *Sekretaris Pekon*, Wawancara Di Balai Pekon Kampung Jawa, Tanggal 19 Februari 2019.

**Tabel 21**  
**Program Dana Desa Pekon Kampung Jawa**

No	Program	Keterangan	Jumlah Dana
1	Pembangunan	Pembukaan badan jalan pemangku III	Rp 371.069.750
		Jembatan beton pemangku III	Rp 133.694.800
		Rabat beton pemangku II	Rp 124.712.100
2	Pemberdayaan Masyarakat	Peningkatan kapasitas kader posyandu	Rp 1.825.000
		Updeting data profil desa	Rp 1.760.000
		Kegiatan pembentukan dan peningkatan kapasitas kader	Rp 6.404.000
		Kegiatan peningkatan kapasitas kelompok masyarakat	Rp 44.472.000
		BUMDES kelompok usaha kursi dan tarub	Rp 65.000.000
Jumlah			Rp 748.937.650

Pada tahun 2017 pekon Kampung Jawa meningkatkan pembangunan dengan menggunakan dana desa. Presentase dana desa yang digunakan untuk pembangunan sebesar 84,05%. Dan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan ekonomi masyarakat dilakukan pemberdayaan masyarakat. Presentase jumlah dana desa untuk pemberdayaan masyarakat sebesar 15,95%.

Pada tahun 2017 pekon Kampung Jawa dalam meningkatkan kesehatan masyarakat melakukan pemberdayaan masyarakat dengan meningkatkan kader posyandu. Seperti yang diungkapkan oleh 2 tokoh masyarakat Kampung Jawa yaitu bapak Sumarkun dan bapak

Ilham, mereka mengungkapkan bahwa pada tahun 2017 pekon seray mengalami peningkatan kesehatan dengan pelaksanaan program dana desa yaitu meningkatkan kapasitas kader posyandu. Secara ekonomi program dana desa tahun 2017 dilaksanakan program BUMDes yaitu sewa kursi tarub.<sup>73</sup>

Yang bertanggung jawab atas pengelolaan dana desa tersebut adalah Kepala pekon Kampung Jawa dalam bentuk pertanggung jawaban laporan keuangan dana desa kepada Bupati Kabupaten Pesisir Barat.

d. Pekon Rawas

Luas wilayah pekon rawas 9,49 Km<sup>2</sup>, dengan kepala desa Nasib Mulyadi, jumlah penduduk 2151 (dua ribu seratus lima puluh satu) jiwa, dan terdapat 491 (empat ratus sembilan puluh satu) KK, pada tahun 2017 desa ini mendapatkan dana desa berjumlah Rp 729.907.750 (tujuh ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).<sup>74</sup>

Proses penyaluran dana desa dari pemerintah pusat (APBN) ke kabupaten/ kota (APBD), dan selanjutnya ke desa (APBdes). Tahap penyaluran 60% bulan Maret dan 40 % bulan agustus.

Proses penentuan program dana desa di Pekon Rawas melalui proses musyawarah antara aparat desa dan tokoh masyarakat dalam

---

<sup>73</sup> Sumarkun dan Ilham, *Toko Masyarakat Pekon Kampung Jawa*, Wawancara Tanggal 20 Februari 2019

<sup>74</sup> Styawan, *Sekretaris Pekon*, Wawancara Di Balai Pekon Rawas, Tanggal 20 Februari 2019.

menyampaikan aspirasi masyarakat di pekon tersebut, jika program telah di musyawarahkan serta disusun dan dana sudah masuk ke rekening pekon maka perangkat pekon mempunyai tim pelaksana kegiatan (TPK) untuk membuat surat perintah pembayaran (SPT).

**Tabel 22**  
**Program Dana Desa Pekon Rawas**

No	Program	Keterangan	Jumlah Dana
1	Pembangunan	Pembangunan rabat beton PMK Bakti Rahayu	Rp 141.345.800
		Pembangunan rabat beton PMK II gg Timun	Rp 41.662.400
		Pembangunan rabat beton PMK III Gang postu	Rp 44.167.250
		Pembangunan rabat beton PMK IV	Rp 85.333.000
		Pembangunan TPT PMK IV gang duku	Rp 148.771.000
		Pembangunan gorong gorong flat pmk IV	Rp 29.300.500
		Pembangunan DAM beton PMK IV	Rp 114.091.000
2	Pemberdayaan Masyarakat	Peningkatan kapasitas posyandu	Rp 12.071.800
		Peningkatan kapasitas aparatur pekon, lembaga dan papan informasi pekon	Rp 19.800.000
		Pelatihan kader pemberdayaan masyarakat	Rp 16.540.000
		Pelatihan tim pemeliharaan	Rp 8.660.000
		Sosialisasi produk hukum	Rp 9.350.000
		Pelatihan ekonomi pekon	Rp 9.350.000
		Pelatihan teknologi tepat guna	Rp 9.350.000

		Peningkatan kapasitas TP PKK	Rp 1.600.000
		Pelatihan tim pelaksana kegiatan	Rp 9.350.000
		pelatihan perencanaan pembangunan pekon	Rp 9.350.000
		Pelatihan kerajinan bambu	Rp 16.775.000
		Pelatihan perencanaan pembangunan pekon	Rp 12.390.000
<b>Jumlah</b>			<b>Rp 729.907.750</b>

Pada tahun 2017 pekon Rawas melakukan peningkatan pembangunan dengan melaksanakan program pembangunan dengan dana desa. Prentase jumlah dana desa yang di prioritaskan pada pembangunan sebesar 82,84%. Program dan desa tahun 2017 yang dilaksanakan oleh pekon Rawas yaitu pemberdayaan masyarakat. Besar presentase dana desa yang digunakan untuk pemberdayaan masyarakat yaitu 17,16%. Dalam program pemberdayaan masyarakat di tahun 2017, pekon Rawas melaksanakan program peningkatan kesehatan masyarakat yaitu peningkatan kaspaitas posyandu yang ada di pekon Rawas. Secara ekonomi pekon Rawas melaksanakan program pemberdayaan ekonomi di tahun 2017 yaitu pelatihan ekonomi pekon dan pelatihan kerajinan bambu.

Berdasarkan wawancara dengan bapak Styawan selaku sekretaris pekon Rawas, beliau mengemukakan bahwa pada tahun 2017

dilakukan peningkatan pembangunan yang bertujuan untuk meperlancar mobilitas masyarakat. Mempermudah akses masyarakat sehingga dapat mendukung perekonomian masyarakat. Pemberdayaan masyarakat pada tahun 2017 dilaksanakan peningkatan kesehatan masyarakat melalui program peningkatan kapasitas posyandu. Secara ekonomi pada tahun 2017 dilaksanakan program pemberdayaan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat yaitu pelatihan ekonomi pekon dan pelatihan kerajinan bambu.<sup>75</sup>

Berdasarkan wawancara dengan Lusi dan Mita, keduanya mengemukakan di tahun 2017 pekon Rawas mengalami peningkatan dalam kesehatan, pembangunan dan pendapatan.<sup>76</sup>

Berdasarkan wawancara dengan Saptuji dan Hermanto selaku toko masyarakat bahwa program dan desa yang dilaksanakan di pekon Rawas dilakukan secara transparan. Program yang dilakukan di tahun 2017 meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam kesehatan dan pendapatan.<sup>77</sup>

Yang bertanggung jawab atas pengelolaan dana desa tersebut adalah Kepala Pekon Rawas dalam bentuk pertanggung jawaban laporan keuangan dana desa kepada Bupati Kabupaten Pesisir Barat.

---

<sup>75</sup> Styawan, *Sekretaris Pekon*, Wawancara Di Balai Pekon Rawas, Tanggal 20 Februari 2019.

<sup>76</sup> Lusi dan Mita, *Masyarakat Pekon Rawas*, Wawancara Di Balai Pekon Rawas, Tanggal 20 Februari 2019.

<sup>77</sup> Saptuji dan Hermanto, *Toko Masyarakat Pekon Rawas*, Wawancara Di Balai Pekon Rawas, Tanggal 20 Februari 2019.

e. Pekon Suka Negara.

Luas wilayah pekon suka negara 16,18 Km<sup>2</sup>, dengan kepala desa bapak Mulyadi, jumlah penduduk 959 (sembilan ratus lima puluh sembilan) jiwa, dan terdapat 233 (dua ratus tiga puluh tiga) KK, pada tahun 2017 desa Suka negara ini mendapatkan Dana Desa sejumlah Rp 756.230.500 (tujuh ratus lima puluh enam juta dua ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah).<sup>78</sup>

Proses penyaluran dana desa dari pemerintah pusat (APBN) ke kabupaten/ kota (APBD), dan selanjutnya ke desa (APBdes). Tahap penyaluran 60% bulan Maret dan 40 % bulan agustus.

proses penentuan program dana desa di Pekon Suka Negara melalui proses musyawarah antara aparatur pekon dan tokoh masyarakat dalam menyampaikan aspirasi masyarakat di pekon tersebut, jika program telah di musyawarahkan serta disusun dan dana sudah masuk ke rekening pekon maka perangkat pekon mempunyai tim pelaksana kegiatan (TPK) untuk membuat surat perintah pembayaran (SPT).

**Tabel 23**  
**Program Dana Desa Pekon Sukanegara**

No	Program	Keterangan	Jumlah Dana
1	Pembangunan	Pembangunan balai pelatihan dan pertemuan	Rp 398.485.500
		Pembangunan drainase volume	Rp 61.215.000

<sup>78</sup> Heryanto, *Sekretaris Pekon*, Wawancara Di Balai Pekon Sukanegara, Tanggal 21 Februari 2019.



2	<b>Pemberdayaan Masyarakat</b>	Pembangunan gronjong	Rp 178.620.000
		Pembangunan pangkalan mandi	Rp 10.500.000
		Bantuan insentif guru PAUD	Rp 6.000.000
		Bantuan insentif guru ngaji	Rp 24.000.000
		Bantuan oprasional pelatihan seni budaya	Rp 3.000.000
		Bantuan oprasional posyandu	Rp 1.200.000
		Bantuan pemberdayaan olahraga	Rp 4.800.000
		Pengadaan pengelolaan papan informasi pekon	Rp 15.000.000
		Pengadaan dan pengelolaan sarana dan prasarana olahraga	Rp 7.100.000
		Kegiatan PKK	Rp 3.000.000
		Belanja peralatan belajar PAUD	Rp 7.710.000
		Belanja barang dan jasa	Rp 18.600.000
		Kegiatan kesehatan masyarakat	Rp 17.000.000
		<b>Jumlah</b>	<b>Rp 756.230.500</b>

Pada tahun 2017 pekon Sukanegara meningkatkan pembangunan yaitu membangun balai pelatihan dan pertemuan, membangun drainase pembangunan gronjong pembangunan pangkalan mandi. Presentase

dana desa yang digunakan untuk pembangunan sebesar 85,80%. Pada tahun 2017 peko Sukanegara melaksanakan pemberdayaan masyarakat. Presentase dana desa yang digunakan untuk pemberdayaan masyarakat yaitu sebesar 14,20%.

Berdasarkan wawancara dengan bapak Heryanto, beliau mengemukakan bahwa pada tahun 2017 pekon Sukanegara meningkatkan pendidikan dengan program memberikan bantuan insentif guru PAUD, bantuan insentif guru ngaji. Dalam upaya meningkatkan kesehatan masyarakat pekon Sukanegara mengalami peningkatan dengan adanya bantuan oprasional posyandu dan kegiatan kesehatan masyarakat.<sup>79</sup>

Berdasarkan wawancara dengan fikran selaku tokoh masyarakat, beliau mengemukakan bahwa pekon Sukanegara mengalami peningkatan pada kesehatan dengan adanya program dana desa tahun 2017 yaitu bantuan oprasional posyandu dan kegiatan kesehatan masyarakat yang dilaksanakan pekon. Secara pendidikan pada tahun 2017 pekon Sukanegara mengalami peningkatan yaitu dengan adanya bantuan insentif guru ngaji, bantuan insentif guru PAUD, belanja peralatan PAUD, pelatihan seni budaya dan adanya pemberdayaan olahraga.<sup>80</sup>

Berdasarkan wawancara dengan Anita dan Mega yang merupakan masyarakat pekon Sukanegara, keduanya mengemukakan

---

<sup>79</sup> Heryanto, *Sekretaris Pekon*, Wawancara Di Balai Pekon Sukanegara, Tanggal 21 Februari 2019.

<sup>80</sup> Fikran, *Toko Masyarakat pekon Sukanegara*, Wawancara Tanggal 21 Februari 2019

bahwa adanya dan desa di tahun 2017 memberikan kesejahteraan kesehatan dan pendidikan pada masyarakat di pekon Sukanegara.<sup>81</sup>

Yang bertanggung jawab atas pengelolaan dana desa tersebut adalah Kepala Pekon Suka Negara dalam bentuk pertanggung jawaban laporan keuangan dana desa kepada Bupati Kabupaten Pesisir Barat.

f. Pekon Pahmungan

Luas wilayah pekon Pahmungan 17,20 ha, dengan kepala desa bapak Nopen Sihando, terdapat 1144 jiwa, dan 582 kk, pada tahun 2017 desa Pahmungan mendapatkan dana desa sejumlah Rp 797.864.940 ( tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh rupiah).<sup>82</sup>

Proses penyaluran dana desa dari pemerintah pusat (APBN) ke kabupaten/ kota (APBD), dan selanjutnya ke desa (APBdes). Tahap penyaluran 60% bulan Maret dan 40 % bulan agustus.

Proses penentuan program dana desa di Pekon Pahmungan melalui proses musyawarah antara aparaturnya pekon dan tokoh masyarakat dalam menyampaikan aspirasi masyarakat di pekon tersebut, jika program telah di musyawarahkan serta disusun dan dana sudah masuk ke rekening pekon maka perangkat pekon mempunyai tim pelaksana kegiatan (TPK) untuk membuat surat perintah pembayaran (SPT).

---

<sup>81</sup>Anita dan Mega, *Masyarakat pekon Sukanegara*, Wawancara Tanggal 21 Februari 2019

<sup>82</sup> Rahmadin, *Sekretaris pekon*, Wawancara Di Balai Pekon Pahmungan, Tanggal 22 Februari 2019.

**Tabel 24**  
**Program Dana Desa Pekon Pahmungan**

No	Program	Keterangan	Jumlah Dana
1	Pembangunan	Pembangunan rabat beton (dusun II masjid, gang pratin, tanjung pura)	Rp 605.725.140
		Jembatan beton	
		Pembangunan talud (gang peratin, gang masjid,dan dusun I)	
		Pembangunan lampu penerangan jalan umum	
3	Pemberdayaan masyarakat	Peningkatan kader posyandu	Rp 124.389.800
		Peningkatan muutu PAUD	
		Oprasional guru ngaji	
		Peningkatan kapasitas TP-PKK	
		Peningkatan investasi ekonomi pekon	
		Pengembangan atau bantuan alat alat produksi permodalan,	
		Peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan	
Jumlah			RP.730.114.940

Pada tahun 2017 pekon pahmungan meningkatkan pembangunan pekon. Presentase jumlah dana desa yang digunakan untuk pembangunan sebesar 82,96%. Pemberdayaan yang dilakukan oleh pekon pahmungan dengan presentase dana desa sebesar 17,04%.

Berdasarkan wawancara dengan bapak Rahmadin, beliau mengemukakan bahwa pada tahun 2017 pekon Pahmungan mengalami peningkatan pembangunan. Secara kesehatan pekon Pahmungan pada tahun 2017 mengalami peningkatan yaitu melalui peningkatan kader posyandu. Secara ekonomi pekon Pahmungan mengalami peningkatan dengan peningkatan investasi ekonomi pekon. Secara pendidikan di tahun 2017 pekon pahmungan mengalami peningkatan melalui pelaksanaan program peningkatan mutu PAUD dan bantuan oprasional guru ngaji.<sup>83</sup>

Hal senada juga diungkapkan oleh bapak Rudi dan Irawan selaku tokoh masyarakat di pekon Pahmungan, keduanya mengemukakan bahwa pekon pahmungan pada tahun 2017 mengalami peningkatan pada pembangunan, kesehatan dan pendapatan. Pada tahun 2017 pekon pahmungan mengalami peningkatan dengan program peningkatan mutu PAUD dan bantuan oprasional guru ngaji.<sup>84</sup>

Berdasarkan wawancara kepada ibu Maryana, Nilawati dan Seri selaku masyarakat pekon Pahmungan, ketiganya mengemukakan bahwa pada tahun 2017 mengalami peningkatan dalam kesehatan dan pendapatan. Dengan adanya pembangunan yang dilakukan dapat memperlancar mobilitas masyarakat sehingga mempermudah aktivitas perekonomian masyarakat. Adanya peningkatan mutu PAUD di tahun

---

<sup>83</sup>Rahmadin, *Sekretaris pekon*, Wawancara Di Balai Pekon Pahmungan, Tanggal 22 Februari 2019.

<sup>84</sup>Rudi dan Irwan, *Toko Masyarakat Pekon Pahmungan*, Wawancara Di Balai Pekon Pahmungan, Tanggal 22 Februari 2019.

2017 dan bantuan oprasional guru ngaji dapat meningkatkan kesejahteraan pendidikan di tahun 2017.<sup>85</sup>

Yang bertanggung jawab atas pengelolaan dana desa tersebut adalah Kepala Pekon Pahmungan dalam bentuk pertanggung jawaban laporan keuangan dana desa kepada Bupati Kabupaten Pesisir Barat.

## **2. Dampak dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Pesisir Tengah**

### **a. Pendidikan**

Pendidikan adalah suatu bimbingan untuk menegembangkan potensi anak untuk mencapai kedewasaan dengan tujuan agar anak tersebut cukup cakap dalam melaksanakan tugas hidupnya dan tidak tergantung kepada orang lain. Pendidikan dapat diperoleh di lembaga-lembaga formal ataupun non formal.

Pada Tahun 2017 di pekon Way Redak belum menjalankan program yang berdampak pada kesejahteraan pendidikan di pekon Way Redak. Pekon Seray pada tahun 2017 mengalami peningkatan kesejahteraan melalui program peningkatan mutu PAUD yang dilaksanakan oleh pekon Seray. Pekon Kampung Jawa pada tahun 2017 belum mengalami peningkatan pada pendidikan. Tahun 2017 pekon Rawas belum mengalami peningkatan kesejahteraan dalam pendidikan. Tahun 2017 pekon Sukanegara mengalami peningkatan kesejahteraan bidang pendidikan yaitu adanya bantuan insentif guru

---

<sup>85</sup> Maryana, Nilawati dan Seri, *Masyarakat Pekon Pahmungan*, Wawancara Di Balai Pekon Pahmungan, Tanggal 22 Februari 2019.

PAUD, bantuan insentif guru ngaji, bantuan oprasional senibudaya dan pemberdayaan olahraga. Untuk pekon Pahmungan pada tahun 2017 mengalami peningkatan kesejahteraan pendidikan melalui program peningkatan mutu PAUD dan bantuan oprasional guru ngaji.

Jadi pada tahun 2017 dampak dari program dana desa yang mengalami peningkatan kesejahteraan pendidikan masyarakat yaitu pekon Seray, Rawas, Sukanegara dan Pahmungan.

#### **b. Kesehatan**

Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Minimnya sarana dan prasarana kesehatan di Kecamatan Pesisir Tengah seperti tidak adanya puskesmas membuat masyarakat lebih memilih untuk mendatangi bidan jika sakit untuk mendapatkan pertolongan pertama.

Tahun 2017 dampak program danan desa yang memberikan dampak peningkatan kesejahteraan kesehatan masyarakat yaitu pekon Way Redak melalui peningkatan pelaksanaan posyandu, posbindu, pengadaan ranjang posyandu, pengadaan alat tensi darah, stretoscope, dotpler dan pembuatan tong sampah yang dilaksanakan di tahun 2017. Pekon Seray tahun 2017 mengalami peningkatan kesejahteraan kesehatan masyarakat yaitu dengan program peningkatan kader posyandu. Pekon Kampng Jawa pada tahun 2017 mengalami peningkatan kesejahteraan kesehatan masyarakat melalui program



peningkatan kapasitas posyandu. Pekon Rawas pada tahun 2017 pekon Rawas mengalami peningkatan kesehatan yaitu bantuan oprasional posyandu. Pekon Sukanegara tahun 2017 mengalami peningkatan kesejahteraan kesehatan masyarakat melalui peningkatan kader posyandu dan pembangunan pangkalan mandi. Pekon Pahmungan dalam kesehatan mengalami kesejahteraan dengan adanya program dana desa ditahun 2017 yaitu peningkatan kapasitas posyandu.

Jadi pada tahun 2017 di Kecamatan Pesisir Tengah mengalami kesejahteraan kesehatan di setiap pekon melalui program dana desa yang dilaksanakan di tahun 2017.

#### **c. Pendapatan**

Pendapatan merupakan penghasilan yang diperoleh masyarakat dari penghasilan kepala rumah tangga ataupun pendapatan anggota rumah tangga. Di Kecamatan Pesisir Tengah terdapat berbagai mata pencaharian untuk penduduk yaitu petani, nelayan, pedagang, PNS dan buruh.

Pada tahun 2017 pekon Way Redak belum mengalami peningkatan kesejahteraan pendapatan, pekon Seray mengalami peningkatan kesejahteraan pendapatan pada tahun 2017 melalui pelatihan ekonomi pekon, pekon Kampung Jawa mengalami peningkatan kesejahteraan pendapatan melalui program BUMDES pada tahun 2017, pekon Rawas pada tahun 2017 mengalami peningkatan kesejahteraan pendapatan melalui pelatihan ekonomi

pekon dan pelatihan kerajinan bambu, pekon Sukanegara belum mengalami peningkatan kesejahteraan pendapatan masyarakat di program dana desa tahun 2017, dan pekon Pahlungan mengalami peningkatan kesejahteraan pendapatan melalui program peningkatan investasi ekonomi pekon.

Jadi pada tahun 2017 pekon di Kecamatan Pesisir Tengah yang mengalami peningkatan kesejahteraan pendapatan yaitu pekon Seray, Kampung Jawa, Rawas, Sukanegara dan Pahlungan.

#### **d. Pengeluaran**

Tingkat pengeluaran masyarakat di dasarkan pada pendapatan masyarakat itu sendiri, pendapatan masyarakat yang rendah berpengaruh pada pola konsumsi rumah tangga biasanya jika pendapatan rendah konsumsi akan diutamakan untuk kebutuhan belanja makanan karna makanan adalah kebutuhan pokok untuk memenuhi kebutuhan jasmani, belanja konsumsi terdiri dari belanja sandang, pangan dan papan dan lain - lain.

Pada tahun 2017 masyarakat di Kecamatan Pesisir Tengah mengalami kesejahteraan pengeluaran. Masyarakat di Kecamatan Pesisir Tengah mampu memenuhi kebutuhan makan, kesehatan, pendidikan dan biaya lain lain dalam kehidupan sehari hari.

#### **e. Perumahan**

Menurut Biro Pusat Statistik (BPS) dikatakan perumahan yang dianggap sejahtera adalah tempat berlindung yang mempunyai dinding

lantai dan atap yang baik. Bangunan yang dianggap kategori sejahtera adalah luas lantainya lebih dari 10 m<sup>2</sup> dan bagian terluas dari rumah bukan tanah, status penguasaan tempat tinggal milik sendiri.

Bentuk bangunan rumah masyarakat Kecamatan Pesisir Tengah 80 % permanen 10 % semi permanen dan 10 % dalam keadaan darurat. Status kepemilikan rumah di Kecamatan Pesisir Tengah adalah milik sendiri. Fasilitas MCK warga memiliki 70 % yang memiliki sanitasi yang baik, selebihnya hanya menggunakan MCK seadanya. Kondisi sumber air bersih cukup memadai.

Di pekon sukanegara pada tahun 2017 untuk meningkatkan perumahan masyarakat dibangun pangkalan mandi untuk masyarakat, pada pekon Rawas pada tahun 2017 belum berdampak positif pada perumahan masyarakat, pada pekon Way Redak program dana desa yang berdampak positif pada perumahan yaitu program pembuatan tong sampah, pekon Kampung Jawa dan Seray program dana desa belum memberikan dampak positif terhadap tingkat perumahan.

Jadi di Kecamatan Pesisir Tengah program dana desa yang berdampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat yaitu pekon Sukanegara dan Way redak.

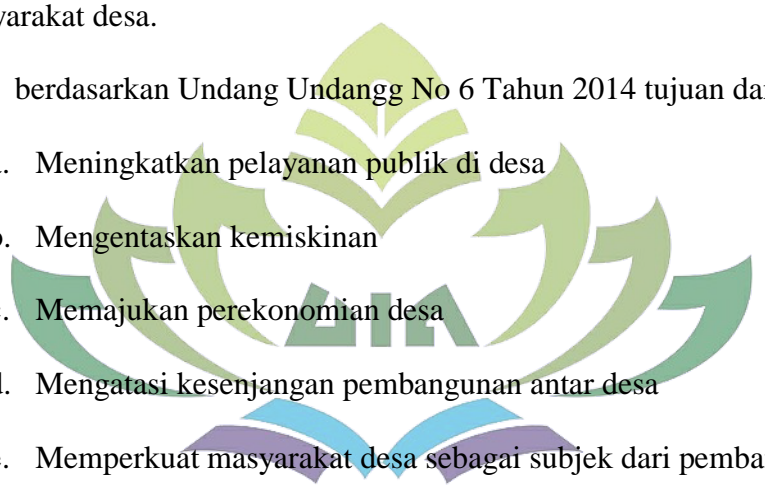
## **BAB IV**

### **ANALISIS PROGRAM DANA DESA TERHADAP PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**

#### **A. Program dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Pesisir Tengah**

Dana Desa merupakan dana APBN yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten kota selanjutnya ke APBDes dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

berdasarkan Undang Undang No 6 Tahun 2014 tujuan dana desa yaitu:

- 
- a. Meningkatkan pelayanan publik di desa
  - b. Mengentaskan kemiskinan
  - c. Memajukan perekonomian desa
  - d. Mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa
  - e. Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan

Dari data yang dikumpulkan Kecamatan Pesisir Tengah mendapatkan dana desa berkisar Rp 4.338.114.508 (empat milyar tiga ratus tiga puluh delapan juta seratus empat belas ribu lima ratus delapan rupiah), yang diberikan berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis.

Pada tahun 2017 program dana desa di Kecamatan Pesisir Tengah digunakan untuk kesejahteraan masyarakat pekon sesuai dengan tujuan dari dana desa. Terdapat 6 pekon yang ada di Kecamatan Pesisir Tengah yaitu Pekon Way Redak, Seray, Kampung Jawa, Rawas, Sukanegara dan

Pahmungan. Keenam pekon yang ada di Kecamatan Pesisir Tengah pada tahun 2017 melaksanakan program dana desa yaitu pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pada bidang kesehatan, pendidikan, pendapatan, pengeluaran dan perumahan.

Pekon Way redak penggunaan dana desa untuk pembangunan yaitu sebesar 81,21% dan untuk pemberdayaan masyarakat sebesar 18,79%, pekon Seray penggunaan dana desa untuk pembangunan yaitu sebesar 78,38% dan pemberdayaan masyarakat sebesar 21,62%, pekon Kampung Jawa penggunaan dana desa untuk pembangunan sebesar 84,05% dan penggunaan dana desa untuk pemberdayaan masyarakat sebesar 15,95%, pekon Rawas penggunaan dana desa untuk pembangunan sebesar 82,84% dan untuk pemberdayaan masyarakat sebesar 17,16%, pekon Sukanegara penggunaan dana desa untuk pembangunan 85,80%, dan untuk pemberdayaan sebesar 14,20%, dan pekon Pahmungan untuk pembangunan sebesar 82,96% dan untuk pemberdayaan masyarakat sebesar 17,04%. Jadi Program dana desa yang dilaksanakan oleh pekon di Kecamatan Pesisir Tengah lebih di prioritaskan pada pembangunan.

Kesejahteraan masyarakat adalah suatu keadaan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat baik melalui program-program yang di adakan dan di susun oleh pemerintah, maupun kebutuhan dasar yang telah terpenuhi oleh usaha-usaha yang dilakukan masyarakat.

Kesejahteraan masyarakat dapat diukur melalui beberapa indikator, indikator kesejahteraan merupakan suatu ukuran tercapainya masyarakat

dimana masyarakat dapat dikatakan sejahtera atau tidak. Indikator-indikatornya yaitu: tingkat pendidikan, tingkat kesehatan, tingkat pendapatan masyarakat, komposisi pengeluaran, tingkat perumahan masyarakat yang menjadi tolak ukur kesejahteraan masyarakat dalam program Dana Desa.

## **B. Dampak program dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Pesisir Tengah**

Kesejahteraan adalah suatu keadaan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat baik melalui program program yang diadakan dan disusun oleh pemerintah, maupun kebutuhan dasar yang telah terpenuhi oleh usaha usaha yang telah dilakukan oleh masyarakat.

Dari data yang diperoleh setelah dilakukan wawancara dan observasi maka peneliti menganalisis program dana desa terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai berikut:

### **1. Tingkat Pendidikan**

Pendidikan merupakan bimbingan atau pertolongan yang diberikan oleh orang dewasa kepada perkembangan anak untuk mencapai kedewasaan dengan tujuan agar anak cakap melaksanakan tugas hidupnya sendiri dengan tidak memerlukan bantuan orang lain. Masyarakat memandang lembaga pendidikan formal sebagai peranan kunci dalam mencapai tujuan sosial.

Masyarakat Kecamatan Pesisir Tengah jika ditinjau dari latar belakang pendidikan sudah menerapkan wajib belajar sembilan tahun, bahkan ada masyarakat yang meneruskan kejenjang SMA, dan S1.

Penggunaan dana desa diprioritaskan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas hidup masyarakat serta penanggulangan kemiskinan, melalui pemenuhan kebutuhan dasar dan pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal dan pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pemenuhan kebutuhan dasar dalam penggunaan dana desa meliputi pengembangan pos kesehatan dan polindes, pembinaan dan pengelolaan posyandu, dan pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini. Hal ini sesuai dengan tujuan dana desa berdasarkan Undang-Undang No 6 Tahun 2014.

Pada Tahun 2017 di pekon Way Redak belum menjalankan program yang berdampak pada kesejahteraan pendidikan di pekon Way Redak. Pekon Seray pada tahun 2017 mengalami peningkatan kesejahteraan melalui program peningkatan mutu PAUD yang dilaksanakan oleh pekon Seray. Pekon Kampung Jawa pada tahun 2017 belum mengalami peningkatan pada pendidikan. Tahun 2017 pekon Rawas belum mengalami peningkatan kesejahteraan dalam pendidikan. Tahun 2017 pekon Sukanegara mengalami peningkatan kesejahteraan bidang pendidikan yaitu adanya bantuan insentif guru PAUD, bantuan insentif guru ngaji, bantuan operasional senibudaya dan pemberdayaan olahraga. Untuk pekon Pahmungan pada tahun 2017 mengalami peningkatan kesejahteraan pendidikan melalui program peningkatan mutu PAUD dan bantuan operasional guru ngaji.



Jadi pada tahun 2017 dampak dari program dana desa yang mengalami peningkatan kesejahteraan pendidikan masyarakat yaitu pekon Seray, Rawas, Sukanegara dan Pahlungan.

## 2. Tingkat kesehatan

Kesehatan adalah suatu keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara ekonomis. Dalam penanganan kesehatan ada beberapa tim medis seperti dokter, bidan dan perawat serta adanya keberadaan puskesmas dan rumah sakit dapat membantu masyarakat.

Pengembangan pos kesehatan dan polindes merupakan cara untuk memenuhi kebutuhan dasar dalam upaya pembangunan desa untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan kualitas hidup masyarakat serta penanggulangan kemiskinan.

Tahun 2017 dampak program dana desa yang memberikan dampak peningkatan kesejahteraan kesehatan masyarakat yaitu pekon Way Redak melalui peningkatan pelaksanaan posyandu, posbindu, pengadaan ranjang posyandu, pengadaan alat tensi darah, stetoscope, dopler dan pembuatan tong sampah yang dilaksanakan di tahun 2017. Pekon Seray tahun 2017 mengalami peningkatan kesejahteraan kesehatan masyarakat yaitu dengan program peningkatan kader posyandu. Pekon Kampng Jawa pada tahun 2017 mengalami peningkatan kesejahteraan kesehatan masyarakat melalui program peningkatan kapasitas posyandu. Pekon Rawas pada tahun 2017 pekon Rawas mengalami peningkatan kesehatan yaitu bantuan operasional

posyandu. Pekon Sukanegara tahun 2017 mengalami peningkatan kesejahteraan kesehatan masyarakat melalui peningkatan kader posyandu dan pembangunan pangkalan mandi. Pekon Pahmungan dalam kesehatan mengalami kesejahteraan dengan adanya program dan desa ditahun 2017 yaitu peningkatan kapasitas posyandu.

Jadi pada tahun 2017 di Kecamatan Pesisir Tengah mengalami kesejahteraan kesehatan di setiap pekon melalui program dana desa yang dilaksanakan di tahun 2017.

### 3. Tingkat Pendapatan

Tingkat pendapatan merupakan penghasilan yang diperoleh masyarakat yang bersal dari pendapatan kepala rumah tangga. Penghasilan tersebut biasanya dialokasikan untuk konsumsi, kesehatan maupun pendidikan dan kebutuhan lainnya yang bersifat material.

Tujuan dana desa dalam Undang Undang Nomor 6 Tahun 2004 Tentang Dana Desa, tujuan dana desa adalah untuk meningkatkan pelayanan publik di desa, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa, dan memeperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan.

Pada tahun 2017 pekon Way Redak belum mengalami peningkatan kesejahteraan pendapatan, pekon Seray mengalami peningkatan kesejahteraan pendapatan pada tahun 2017 melalui pelatihan ekonomi pekon, pekon Kampung Jawa mengalami peningkatan kesejahteraan pendapatan melalui program BUMDES pada tahun 2017, pekon Rawas

pada tahun 2017 mengalami peningkatan kesejahteraan pendapatan melalui pelatihan ekonomi pekon dan pelatihan kerajinan bambu, pekon Sukanegara belum mengalami peningkatan kesejahteraan pendapatan masyarakat di program dana desa tahun 2017, dan pekon Pahlungan mengalami peningkatan kesejahteraan pendapatan melalui program peningkatan investasi ekonomi pekon.

Jadi pada tahun 2017 pekon di Kecamatan Pesisir Tengah yang mengalami peningkatan kesejahteraan pendapatan yaitu pekon Seray, Kampung Jawa, Rawas, Sukanegara dan Pahlungan.

#### 4. Komposisi Pengeluaran

Pola konsumsi rumah tangga merupakan salah satu indikator kesejahteraan rumah tangga/keluarga. Makin tinggi tingkat penghasilan rumah tangga, maka semakin kecil proporsi pengeluaran untuk makan pada seluruh pengeluaran rumah tangga. Dapat dikatakan bahwa rumah tangga sejahtera bila presentase pengeluaran makanan akan jauh lebih kecil dibandingkan presentase pengeluaran untuk non makanan atau <80% dari pendapatan.

Meskipun tingkat pendapatan masyarakat tidak menentu karena masyarakat di Kecamatan Pesisir Tengah mayoritas petani yang mengandalkan musim panen. Namun jika pendapatan mereka tinggi maka konsumsi dapat tercukupi dengan baik, akan tetapi jika pendapatan mereka semakin sedikit, maka hanya untuk kebutuhan pangan saja. Umumnya pengeluaran konsumsi yaitu Rp 30.000 perhari. Ini belum termasuk biaya

pendidikan, kesehatan perumahan serta pajak bumi dan bangunan, kendaraan bermotor dan lain sebagainya. Hal ini diungkapkan oleh ibu Nilawati, bapak Fikran, Ibu Anita dan ibu Kartini.

## 5. Perumahan

Menurut Biro Pusat Statistik (BPS) dikatakan perumahan yang dianggap sejahtera adalah tempat berlindung yang mempunyai dinding lantai dan atap yang baik. Bangunan yang dianggap kategori sejahtera adalah luas lantainya lebih dari 10 m<sup>2</sup> dan bagian terluas dari rumah bukan tanah, status penguasaan tempat tinggal milik sendiri.

Bentuk bangunan rumah masyarakat Kecamatan Pesisir Tengah 80 % permanen 10 % semi permanen dan 10 % dalam keadaan darurat. Status kepemilikan rumah di Kecamatan Pesisir Tengah adalah milik sendiri. Fasilitas MCK warga memiliki 70 % yang memiliki sanitasi yang baik, selebihnya hanya menggunakan MCK seadanya. Kondisi sumber air bersih cukup memadai.

Di pekan sukanegara pada tahun 2017 untuk meningkatkan perumahan masyarakat dibangun pangkalan mandi untuk masyarakat, pada pekan Rawas pada tahun 2017 belum berdampak positif pada perumahan masyarakat, pada pekan Way Redak program dana desa yang berdampak positif pada perumahan yaitu program pembuatan tong sampah, pekan Kampung Jawa dan Seray program dan desa belum memberikan dampak positif terhadap tingkat perumahan.

Jadi di Kecamatan Pesisir Tengah program dana desa yang berdampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat yaitu pekon Sukanegara dan Way redak.

#### **6. Analisis program dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Pesisir Tengah dalam Perspektif Ekonomi Islam**

Dapat disimpulkan dari hasil wawancara diatas bahwa pemerintah pekon di Kecamatan Pesisir Tengah berupaya mempertanggung jawabkan apa yang menjadi amanah bagi pemerintahan pekon yaitu mengelola dana desa dengan jujur dan amanah dengan merangkul semua pihak dalam pemberdayaan dan pembangunan. Pemberdayaan masyarakat menjadikan masyarakat mandiri, memiliki keterampilan serta berkreatif dan berkompeten. Dalam pembangunan Sarana dan prasarana desa dibangun bertujuan untuk memfasilitasi masyarakat dari aspek kesehatan, pendidikan, keamanan, serta perekonomian.

Dalam Surat Al-Qashash ayat 77 yang menjelaskan:

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ  
كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾

Artinya: Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.

Berdasarkan ayat tersebut kandungan yang sangat jelas bahwa kewajiban seorang muslim dan manusia untuk selalu berusaha sekuat tenaga dan pikiran untuk memperoleh harta dan mencari harta tersebut dengan

bersungguh-sungguh sesuai dengan apa yang telah dianugerahkan oleh Allah SWT. Manusia berkewajiban untuk berusaha dengan bersungguh-sungguh dalam menggunakan kemampuan yang dimilikinya dalam mencari, menggunakan dan memanfaatkan sumberdaya yang ada di muka bumi, karena dalam ayat Al-Qashash telah disebutkan Allah tidak merubah suatu kaum melainkan hambanya yang merubah. Artinya Allah telah membukakkan jalan untuk masyarakatnya dalam menggunakan potensi dan kemampuannya dalam menyejahterakan kehidupannya, tergantung kepada masyarakatnya dapat menggunakan program yang telah ada atau tidak. Pemerintah pekon dalam pengelolaan dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat menerapkan nilai-nilai dasar islam yaitu keadilan, pertanggung jawaban dan tafakul.

a. Keadailan

Pemerintah pekon dalam membuat program dana desa dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran, kejujuran, keberanian dan konsistensi pada kebenaran.

b. Pertanggung jawaban

Pemerintah pekon telah berusaha untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

c. Takaful (jaminan sosial)

Pemerintah telah berusaha mewujudkan hubungan yang baik dan menciptakan hubungan yang aman dan nyaman dilingkungan masyarakat pekon.

Berdasarkan masalahnya, dana desa di Kecamatan Pesisir Tengah mempunyai manfaat bagi kehidupan orang banyak untuk memenuhi kebutuhan akan ibadah, makan, minum, pakaian, bertempat tinggal dan sebagainya yang merupakan bentuk dari pemeliharaan jiwa masyarakat. Kemudian terpenuhinya kebutuhan akan pendidikan. Seperti beberapa kebutuhan dalam islam Dharuriyat, Hajiyyat, Tahsiniyat.

Kebutuhan Dharuriyat, kebutuhan masyarakat ini adalah kebutuhan paling dasar yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda. Bagi responden kelima pokok tersebut sudah dapat terpenuhi, artinya mereka sudah mendapatkan kemashlahatannya.

Kebutuhan Hajiyyat, adalah hanya unsur kesenangan dan kehidupan terasa nyaman, menurut para responden setelah mendapatkan pendapatan yang cukup sehingga dapat membeli barang-barang yang diinginkan dengan tetap tidak terlalu konsumtif.

Kebutuhan Tahsiniyat, berkenaan dengan kebutuhan-kebutuhan yang berfungsi sebagai penghias yang didalamnya terdapat kenikmatan hidup yang berada pada kemewahan dan tingkatannya diatas kebutuhan Dharuriyat dan Hajiyyat.

Dari ketiga kebutuhan tersebut para responden telah memenuhi kebutuhan Dharuriyat dan Hajiyyat, sedangkan kebutuhan Tahsiniyat belum mampu terpenuhi. Dan Al-Qur'an secara sempurna mendefinisikan tentang kesejahteraan, yaitu kesejahteraan individu-individu yang mempunyai tauhid



yang kuat kemudian tercukupi kebutuhan dasarnya dan tidak berlebih-lebihan, sehingga suasana menjadi aman, nyaman, dan tentram.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian, analisis, pengolahan data dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Pelaksanaan program dana desa Pekon Way Redak untuk pembangunan yaitu sebesar 81,21% dan pemberdayaan masyarakat sebesar 18,79%, pekong Seray untuk pembangunan yaitu sebesar 78,38% dan pemberdayaan masyarakat sebesar 21,62%, pekong Kampung Jawa untuk pembangunan sebesar 84,05% dan untuk pemberdayaan masyarakat sebesar 15,95%, pekong Rawas untuk pembangunan sebesar 82,84% dan untuk pemberdayaan masyarakat sebesar 17,16%, pekong Sukanegara untuk pembangunan 85,80%, dan untuk pemberdayaan sebesar 14,20%, dan pekong Pahmungan untuk pembangunan sebesar 82,96% dan untuk pemberdayaan masyarakat sebesar 17,04%.
2. Pada tahun 2017 program dana desa telah memberikan dampak kesejahteraan kesehatan pada pekong Way Redak, Rawas, Kampung Jawa, Sukanegara dan Pahmungan, kesejahteraan pendidikan pada pekong Seray, Rawas, Sukanegara dan Pahmungan, kesejahteraan pendapatan pada pekong Way Redak, Seray, Kampung Jawa, Rawas dan Pahmungan, kesejahteraan pengeluaran pada pekong Way Redak, Seray, Kampung Jawa, Rawas, Sukanegara dan Pahmungan, dan kesejahteraan perumahan pada pekong Sukanegara dan Pahmungan.
3. Dampak dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat dalam perspektif ekonomi Islam berdasarkan masalahnya masyarakat di Kecamatan Pesisir Tengah dapat memenuhi kebutuhan Dharuriyat dan Hajiyat dalam

penerapannya dana desa telah menerapkan prinsip islam yaitu keadilan, pertanggung jawaban dan takaful.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, dapat diajukan beberapa hal yang diharapkan bisa diterapkan yaitu:

1. Program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan dipekon sabaiknnya lebih mengutamakan pelatihan langsung masyarakat khususnya dibidang ekonomi masyarakat seperti keterampilan yang diberikan dan ditindak lanjuti.
2. Untuk pemerintah pusat agar dapat menambah dana desa karena dana sangat minim untuk keperluan Kecamatan Pesisir Tengah
3. Untuk pemerintah daerah seharusnya memperhartikan pelatihan pengelolaan keuangan untuk aperatur desa beserta Badan Permasyarakatan Desa (BPD) sehingga meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
4. Untuk pemerintah desa seharusnya program dana desa lebih mengarahkan kepada pemberdayaan ekonomi masyarakat dan benar-benar dikelola dengan baik sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.
5. Seharusnya porsi pembagian dana desa harus sesuai dengan peraturan, sehingga pendapatan masyarakat akan meningkat, dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
6. Kemampuan penulis sangat terbatas untuk lebih mendalami masing-masing desa khususnya di Kecamatan Pesisir Tengah, penulis

menyarankan untuk peneliti selanjutnya lebih mendalami data tentang program dan alokasi dana desa di setiap desa. Terlebih tahun-tahun selanjutnya dana Dana Desa ini semakin besar, jadi dibutuhkan penelitian yang lebih mendalam dalam pelaksanaan Dana Desa.



## DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman Azwar Karim, 2012, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Akbar Prabawa “Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Di Desa Lepu Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara” *Ejournal Ilmu Pemerintahan*, Volume 3, Nomor 1, 2015.
- Al Yasa” Abu Bakar, 2012, *Metode Istishlahiya Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan Dalam Ushul Fiqh*, Banda Aceh: CV Diandra Prima Mitra Media
- Amir Syarifudin, 2008, *Ushul Fiqh Jilid II*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- A. Saibani, 2016, *Tata Kelola Keuangan Desa Dan Pembangunan Desa*, Bandung: Bee Media Pustaka
- Badrudin, Rudy, 2012, *Ekonomi Otonomi Daerah*, Yogyakarta: UUP STIM YKPN
- Chandra Kusuma Putra, Ratih Nur Pratiwi, Suwondo “Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Studi Pada Desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang” *Jurnal Administrasi Publik*, Vol, 1, No. 6 .
- Darsyaf Ibnu Syamsudin, 1994, *Darussalam, Prototype Begeri yang damai*, Surabaya: Media press
- Deddy Supriady Bratakusumah, Dadang Solihin, 2001, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Fauzan Helmi, Sekretaris Desa, Wawancara Di Balai Pekon Way Redak, Tanggal 18 Februari 2019.
- Feiby Vencentia Rangkumahat, Vicky V. J. Panelewen. Arie D. P. Mirah “Dampak Program Dana Desa Terhadap Peningkatan Pembangunan dan Ekonomi di kecamatan Penelengan Kabupaten Minahasa” *Agri-Sosio Ekonomi Unsrat, ISSN*, Volume 13 Nomor 2A, Juli 2017.
- Handari Nawawi, 1997, *Metodelogi Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Perss
- Heri Risal Bungkaes, J. H Posumah, Burhanudin Kya, *Hubungan Efektifitas Pengelolaan Program Raskin Demgam Peningkatan Kesejahteraan*

*Masyarakat Di Desa Mamahan Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaund Journal Acta Di Jurnal Edisi (April 2013).*

Intan Mala Sari “Analisis Ekonomi Kebijakan Dana Desa Terhadap Kemiskinan Desa Di Kabupaten Tulungagung” *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol. 15, No.01 Juni 2017.

Kementerian Republik Indonesia, Indeks Pembangunan Kesehatan Manusia.

Kristina Korniti Kila “Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Miau Baru Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur” *Jurnal Administrasi Negara* Volume 5. No.1 Tahun 2017.

Lina Nasehatun Nafidah, Nur Anisa “Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Kabupaten Jombang” *Jurnal Ilmu Akuntansi*, Volume 10 No. 2, Oktober 2017.

Malayu S.P, Hasibuan, 2015, *Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah*, Jakarta: PT Bumi Aksara

Muhammad Eko Atmojo, Helen Dian Fridayanti, Aulia Nur Kasiwi, Mardha Adhi Pratama “Efektivitas Dana Desa Untuk Pengembangan Potensi Ekonomi Berbasis Partisipasi Masyarakat Di Desa Bangunjiwo” *Jurnal Ilmu Pemerintahan Universitas MuhammadiyahYogyakarta*, Vol.5. No.1 Tahun 2017.

Muslimin Kara, *Pemikiran AL-Syathibi Tentang Mashlahah Dan Implementasinya Dalam Ekonomi Syariah*, E-Journal Asset Volume 202 Tahun 2012.

M. Ahmad Anwar, 1975, *Prinsip Prinsip Metode Research* Yogyakarta: Sumbangsih

M. Iqbal Hasan, 2005, *Pokok Pokok Materi Statistik 2*, Jakarta: Bumi Aksara

Nurman, 2013, *Strategi Pembangunan Daerah*, Pekanbaru: PT Rajagrafindo Persada

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), 2009, *Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Press

Rudi Badrudin, 2012, *Ekonomi Otonomi Daerah*, Yogyakarta: UUPSTIM YKPN

Ruslan Abdul Ghofur Noor, 2013, *Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam Dan Format Keadailan Ekonomi di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, 1988, *Terjemahan Tafsir Singkat Ibnu Katsir Jilid IV*, Surabaya: Bina Ilmu

Sri Mulyani Indrawati, *Buku Pintar Dana Desa*, (Jakarta: Kementrian Keuangan Republik Indonesia).

SUB Direktorat Analisis Statistik, 2008, *Analisis Dan Perhitungan Tingkat Kemiskinan*, Jakarta: Badan Pusat Statistik

Sudarsono, 1982, *Pengantar Ekonomi Mikro*, Jakarta: LP3ES

Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: Alfabeta

Sugiyono, 2014, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta

Sugiyono, 2017, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, Bandung: Alfabeta

Surayin, 2001, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Bandung: Yrama Widya  
Suryadi Effendi, *Upaya Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Taman Rahayu Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi*, (Skripsi Program Sarjana Ilmu Sosial Islam Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2008).

Todaro P Michael, Semith C Stephen, 2003, *Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga*, Jakarta: Erlangga

Undang Undang RI Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial

Yusuf Al-Qadharwai, 2009, *Fikih Praktis Bagi Kehidupan Modern*, Kairo: Makabah Wabah

Wawancara Hipni, *Kasubag Umum dan Keuangan*, Tanggal 10 September 2018

Wawancara Fauzan Helmi, *Sekretaris Pekon Way Redak*, Tanggal 18 Februari 2019

Wawancara Wahyudi, *Kaur Keuangan Seray*, Tanggal 18 Februari 2019

Wawancara Edi Suwiryo, *Sekretaris Pekon Kampung Jawa*, Tanggal 19 Februari 2019



Wawancara Styawan, *Sekretaris Pekon Rawas*, Tanggal 20 Februari 2019

Wawancara Heryanto, *Sekretaris Pekon Sukanegara*, Tanggal 21 Februari 2019

Wawancara Dewi, *Warga Kecamatan Pesisir Tengah*, Tanggal 21 februari 2019

Wawancara Dian Puspita, *Warga Kecamatan Pesisir Tengah*, Tanggal 21 februari 2019

Wawancara Sarmun, *Warga Kecamatan Pesisir Tengah*, Tanggal 21 februari 2019

Wawancara Hermanto, *Warga Kecamatan Pesisir Tengah*, Tanggal 21 februari 2019

Wawancara rahmadin, *Sekretaris Pekon Pahlungan*, Tanggal 22 Februari 2019

Wawancara Anita, *Warga Kecamatan Pesisir Tengah*, Tanggal 22 februari 2019

Wawancara Nilawati, *Warga Kecamatan Pesisir Tengah*, Tanggal 22 februari 2019

Wawancara Maryana, *Warga Kecamatan Pesisir Tengah*, Tanggal 22 februari 2019

Wawancara Kartini, *Warga Kecamatan Pesisir Tengah*, Tanggal 22 februari 2019

Wawancara Seri, *Warga Kecamatan Pesisir Tengah*, Tanggal 22 februari 2019

Wawancara Mega, *Warga Kecamatan Pesisir Tengah*, Tanggal 22 februari 2019

Wawancara Lina, *Warga Kecamatan Pesisir Tengah*, Tanggal 23 februari 2019

Wawancara Tika Fatmawati, *Warga Kecamatan Pesisir Tengah*, Tanggal 24 februari 2019

Wawancara Minarti, *Warga Kecamatan Pesisir Tengah*, Tanggal 24 februari 2019

Wawancara Ilham Ahmadi, *Warga Kecamatan Pesisir Tengah*, Tanggal 25 februari 2019

Wawancara Saptuji, *Warga Kecamatan Pesisir Tengah*, Tanggal 26 februari 2019

Gambar 2  
Wawancara Masyarakat di Kecamatan Pesisir Tengah



Gambar 3  
Rabat Beton Bakti Rahayu



Gambar 4  
Rabat Beton Pahlmungan



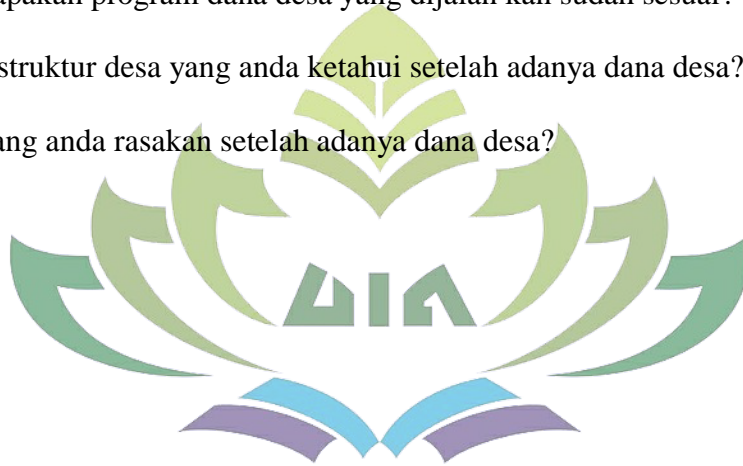
## **Pedoman Wawancara**

Nama :

Umur :

1. Berapakah jumlah anggota keluarga anda?
2. Apakah rata rata pendidikan keluarga anda?
3. Apakah pekerjaan anda?
4. Berapakah penghasilan anda perbulan ?
5. Berapakah jumlah pengeluaran rumah tangga anda?
6. Berapa kali sehari anda dan keluarga makan?
7. Berapa kali dalam seminggu berganti menu makanan?
8. Berapa kali anda berbelanja pakaian dalam setahun?
9. Apakah jenis lantai rumah anda?
10. Apakah jenis tembok rumah anda?
11. Apakah anda memiliki fasilitas MCK?
12. Apa yang anda gunakan untuk memasak?
13. Apakah sumber penerangan rumah anda?
14. Apakah alat transportasi yang anda miliki?
15. Apakah anda ikut berpartisipasi dalam pemerintahan?
16. Apakah anda pernah menjadi donatur di masyarakat?
17. Apakah jenis layanan kesehatan yang anda gunakan ketika mengalami suatu masalah kesehatan?
18. Apakah anda mengetahui program apa saja yang ada di desa anda tentang dana desa?

19. Apakah setelah adanya dana desa anda merasakan adanya peningkatan untuk pendapatan anda pada tahun 2016 dan pada tahun 2017?
20. Apakah setelah adanya dana desa anda merasakan adanya peningkatan untuk pendidikan pada tahun 2016 dengan tahun 2017 ?
21. Apakah setelah adanya dana desa anda merasakan adanya peningkatan untuk keshatan pada tahun 2016 dan pada tahun 2017?
22. Apakah ada perubahan pengeluaran anda setelah dana desa tahun pada rtahun 2016 dan tahun 2017 ?
23. Menurut anda apakah program dana desa yang dijalan kan sudah sesuai?
24. Apa saja insfrastruktur desa yang anda ketahui setelah adanya dana desa?
25. Apa dampak yang anda rasakan setelah adanya dana desa?



Pewawancara

Responden

Yusril Mulia  
NPM.1451010271

(.....)